

**ANALISIS PELAPORAN PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DI
KANTORDINAS KETAHANAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Disusun Oleh:

Idith Gavrilla Tandiongan

NIM. 4519013067

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2023

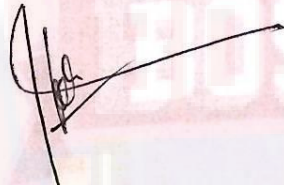
HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Pelaporan Penilaian Kinerja Keuangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Nama Mahasiswa : Idith Gavrilla Tandiongan
Stambuk/NIM : 4519013067
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., M.Si

Thanwain, SE., M. Si.

Mengetahui Dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

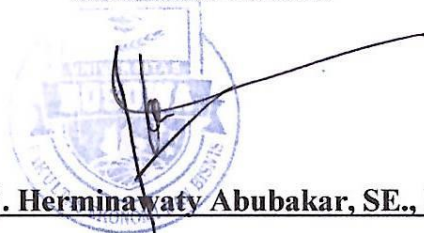
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Akuntansi



Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., M.Si

Thanwain, SE., M. Si.

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Idith Gavrilla Tandiongan

NIM : 4519013067

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Judul : Analisis Pelaporan Penilaian Kinerja Keuangan di Kantor
Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Provinsi Sulawesi Selatan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 18 Juli 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



Idith Gavrilla Tandiongan

4519013067

PRAKATA

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bosowa tahun 2023.

Skripsi ini dapat terselesaikan tentu dari bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, yakni:

1. Kedua orang tua saya paulus tandiongan dan retha tandilimbong yang selalu mendoakan tulus, memberi dukungan, materi, semangat, kasih sayang dan nasihat yang tiada henti.
2. Teruntuk Saudara saya valentino tandiongan dan inggrid tandiongan yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
3. Rektor Universitas Bosowa Makassar Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST., M.Si.
4. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abubakar, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar selaku pembimbing satu yang telah membantu, memberi motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Thanwain, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi selaku pembimbing dua yang selalu membantu, sabar dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu pimpinan Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membantu memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Kepada sahabat penulis Fadillah Utami si paling galau dan Gebi Gabriella si paling kalasi terima kasih telah menemani dari maba sampai sekarang yang selalu mendukung, menemani, memberikan keceriaan, tempat bercerita dan tempat bergosip juga semoga persahabatan kita bertiga terus berlanjut sampai tua pokoknya semangat sampai ujian akhir.
8. Kepada Keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teruntuk tim Kamar Pakde KKN-T desa Barugae Ang.53 yang tersayang Aisyah, Vinka, Dedes, Shinta, Iis, Rahmi yang telah memberi dukungan serta semangat bagi penulis.
10. Kepada Palerias Serang S.Sos yang telah menemani penulis ke kampus untuk bimbingan, memberikan masukan dan saran bagi penulis.
11. Teruntuk sahabat penulis Akram Taufiq S.Bns telah memberikan bimbingan yang baik dalam proses penyusunan skripsi ini, yang telah membantu saya untuk mengarahkan penelitian dengan baik dan memberikan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa wujud dari skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita.

Makassar, Juli 2023

Penulis



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pelaporan penilaian kinerja keuangan yang dilakukan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajemen keuangan Kantor Dinas, sementara data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan literatur, dokumen-dokumen terkait, dan laporan keuangan yang telah disusun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sistem pelaporan keuangan yang terorganisir dan sistematis. Mereka secara aktif mengidentifikasi sumber data keuangan yang relevan dan melaksanakan pencatatan transaksi secara akurat dan terperinci. Langkah selanjutnya adalah verifikasi dan validasi data keuangan untuk memastikan keakuratannya. Data keuangan yang telah terverifikasi dikumpulkan dan digabungkan dalam laporan keuangan yang komprehensif sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Laporan keuangan ini mencakup informasi penting mengenai pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, ekuitas, dan informasi keuangan lainnya. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut dianalisis dan diinterpretasikan guna memahami kinerja keuangan Kantor Dinas. Hasil analisis kinerja keuangan tersebut menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan yang lebih efektif. Laporan keuangan yang telah dianalisis juga disesuaikan dengan kebutuhan pengguna informasi dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk manajemen internal, pemangku kepentingan eksternal, dan pihak yang berwenang. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pelaporan penilaian kinerja keuangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Rekomendasi dan saran yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu perbaikan dan peningkatan efisiensi pelaporan kinerja keuangan di lembaga sejenis. Penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan dalam bidang pengelolaan keuangan sektor publik, terutama dalam konteks ketahanan pangan, hortikultura, dan perkebunan. Selain itu, penelitian ini menjadi landasan penting dalam mengoptimalkan proses pelaporan penilaian kinerja keuangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Pelaporan penilaian kinerja keuangan, Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the results of financial performance assessment reporting conducted in the Office of Food Security, Horticulture, and Plantation Affairs in South Sulawesi Province. The research utilizes a qualitative method with a case study approach. Primary data is obtained through in-depth interviews with the financial management of the Office, while secondary data is collected through literature review, relevant documents, and prepared financial reports. The findings of the research reveal that the Office of Food Security, Horticulture, and Plantation Affairs in South Sulawesi Province has an organized and systematic financial reporting system. They actively identify relevant financial data sources and accurately record transactions in detail. The next step involves verification and validation of financial data to ensure accuracy. Verified financial data is then collected and consolidated into comprehensive financial reports in accordance with applicable financial reporting standards. These reports encompass essential information regarding revenue, expenses, assets, liabilities, equity, and other financial information. Subsequently, the financial reports are analyzed and interpreted to understand the financial performance of the Office. The results of the financial performance analysis serve as crucial tools in decision-making and more effective financial planning. The analyzed financial reports are tailored to the information needs of users and disseminated to stakeholders, including internal management, external stakeholders, and authorities. This research contributes to a deeper understanding of the process of financial performance assessment reporting in the Office of Food Security, Horticulture, and Plantation Affairs in South Sulawesi Province. The recommendations and suggestions generated from this research are expected to aid in improving and enhancing the efficiency of financial performance reporting in similar institutions. Moreover, this study has the potential to contribute to knowledge development in the field of public sector financial management, particularly in the context of food security, horticulture, and plantations. Furthermore, this research provides a fundamental basis for optimizing the process of financial performance assessment reporting in the Office of Food Security, Horticulture, and Plantation Affairs in South Sulawesi Province.

Keywords: Financial performance assessment reporting, Office of Food Security Horticulture, and Plantation Affairs.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Lingkup Penelitian	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Perspektif Teori	8
1. Laporan Keuangan	8
2. Analisis Laporan Keuangan	12
3. Penilaian Kinerja Keuangan	14

B. Penelitian Terdahulu	19
C. Kerangka Konseptual	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Desain Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Fokus dan Deskripsi Fokus	24
D. Jenis dan Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data	25
G. Definisi Operasional	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
B. Hasil Penelitian	31
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1 Sistem Pelaporan Penilaian Kinerja Keuangan	32
Tabel 4.2 Kinerja Indikator Kenaikan Padi	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Penelitian	57
Lampiran 2	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	58
Lampiran 3	Laporan Operasional	61
Lampiran 4	Laporan Neraca	64
Lampiran 5	Laporan Perubahan Ekuiditas	66
Lampiran 6	Laporan Realisasi Anggaran 2020	67
Lampiran 7	Laporan Realisasi Anggaran 2021	71
Lampiran 8	Dokumentasi Wawancara Responden 1	76
Lampiran 9	Dokumentasi Wawancara Responden 2	77
Lampiran 10	Dokumentasi Wawancara Responden 3	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap lembaga berupaya untuk memiliki sumber daya manusia yang profesional dan terampil dalam menghadapi persaingan secara nasional maupun global. Adanya sumber daya manusia dengan keterampilan yang handal dapat mendorong lembaga berkembang menjadi lembaga yang berada di garda terdepan dalam bidangnya. Dengan kata lain, sumber daya manusia menjadi bagian yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan lembaga.

Sebuah lembaga untuk dapat dikatakan mempunyai kinerja yang baik, berarti memiliki komponen pelaporan keuangan yang digunakan sebagai alat untuk menilai baik tidaknya kinerja lembaga tersebut. Hal ini akan mempengaruhi keberlangsungan lembaga untuk maju dan kerjasama antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain.

Menurut Fahmi (2018), kinerja dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi, baik itu bersifat orientasi profit atau non profit, selama periode waktu tertentu. Selain itu, Edison, Anwar, dan Komariyah (2017) menyatakan bahwa kinerja dapat dianggap sebagai hasil dari suatu proses yang diukur dan dievaluasi selama periode waktu tertentu, berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, standar penilaian kinerja menjaditanggung jawab untuk menetapkan suatu standar yang dapat meningkatkan kinerjapegawai. Menurut Sulistiowati, Retnowulan, dan Widiyanti (2018), penilaian kinerja merupakan suatu

kegiatan yang penting untuk mengevaluasi prestasi yang telah dicapai oleh karyawan.

Kasmir (2017) menjelaskan bahwa penilaian kinerja adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu. Selain itu, Sulistiowati, Retnowulan, dan Widyanti (2018) juga menyatakan bahwa kinerja dapat diartikan sebagai kemampuan kerja yang tercermin dalam hasil kerja yang dicapai.

Salah satu faktor yang dapat menunjukkan bagaimana kinerja lembaga itu baik atau tidak yaitu dengan analisis laporan keuangan. Lembaga perlu melakukan analisis laporan keuangan karena laporan keuangan digunakan untuk menilai dan digunakan untuk membandingkan kondisi lembaga dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang apakah meningkat atau tidak sehingga lembaga mempertimbangkan keputusan yang akan diambil untuk tahun yang akan datang sesuai dengan kinerja lembaganya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan yang dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan tersebut juga ditunjang dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk lebih melengkapi sistem (Sukardi, Darmawati, & Thanwain, 2016).

Analisis laporan keuangan menggunakan perhitungan rasio-rasio dengan metode *time series analysis* agar dapat mengevaluasi keadaan finansial

dimasa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Rasio dapat dihitung berdasarkan sumber datanya yang terdiri dari rasio neraca yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, rasio-rasio laporan laba-rugi yang disusun dari data yang berasal dari perhitungan laba-rugi, dan rasio-rasio antar laporan yang disusun berasal dari data neraca dan laporan laba-rugi.

Laporan keuangan perlu disusun untuk mengetahui apakah kinerja lembaga tersebut meningkat atau bahkan menurun. Kinerja keuangan telah menjadi indikator pengukur pencapaian pemerintahan dalam menggunakan sumber daya finansialnya yaitu aset, liabilitas, entitas dan juga pendapatan dalam suatu periode tertentu. Kinerja Keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dalam mengukur prestasi dan juga menggunakan modal secara efektif dan juga efisien demi tercapainya tujuan. (Dahlia, Muhlis, & Munawar, 2019). Sementara Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD (Hery Susanto 2019).

Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan lembaga yang berusaha melakukan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Kantor Dinas Ketahanan

Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengetahui kondisi keuangannya perlu adanya penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan berbagai macam rasio untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaporan Penilaian Kinerja Keuangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaporan penilaian kinerja keuangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pelaporan penilaian kinerja keuangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis Sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam melaksanakan penelitian.

2. Bagi Instansi

- a. Memberikan informasi mengenai pelaporan keuangan terhadap penilaian kinerja di kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan di lembaga tersebut.
- b. Memberikan sumbangsi pemikiran atas permasalahan pelaporan keuangan terhadap penilaian kinerja apabila terjadi kasus yang sama dikemudianhari.

3. Bagi Almamater

- a. Memberikan landasan ilmiah yang berguna dalam memahami analisis pelaporan keuangan terhadap penilaian kinerja di kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Memberikan sumbangan pemikiran yang positif dalam rangka memahami analisis pelaporan keuangan dan penilaian kinerja di kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Lingkup Penelitian

Dari latar belakang yang sudah peneliti uraikan diatas, maka lingkup penelitian dari penelitian ini meliputi :

1. Laporan keuangan yang dimaksud adalah adalah neraca, laporan laba-rugi, dan laporan perubahan modal 2 tahun terakhir di Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Objek dari penelitian ini yaitu laporan keuangan pada kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini memiliki sistematika yang terdiri dari tiga bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bagian pertama dalam penelitian ini akan didahului dengan halaman sampul, halaman pengesahan, dan daftar isi.

Pada bagian pertama atau pendahuluan berisi sub bab yaitu : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bagian kedua atau tinjauan pustaka dan kerangka teori memuat uraian lengkap tentang kajian teori pada penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pikir, yang relevan dan terkait dengan penelitian ini.

Pada bagian ketiga atau metode penelitian memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian yang terstruktur.

Pada bagian keempat atau hasil penelitian dan pembahasan secara rinci mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

Pada bagian kelima atau simpulan dan saran memuat uraian secara lengkap tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perspektif Teori

1. Laporan Keuangan

Kondisi keuangan suatu pemerintahan akan dapat diketahui dari laporan keuangan Kantor yang bersangkutan. Laporan keuangan ini diperlukan oleh investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan dalam rangka mengakomodasikan kepentingan masing-masing (Renaldy dkk, 2020)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal atau periode tertentu. (Dahlia dkk, 2019).

Laporan keuangan adalah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Defenisi lain juga menyatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan (Sukardi dkk, 2016).

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal.

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan pada saat ini atau dalam suatu periodetertentu (Kasmir, 2016).

Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat dalam menentukan kebijakan intansi kedepannya dalam mengambil keputusan yang tepat, dengan melihat berbagai persoalan yang ada, baik dari kelemahan dan kekuatan. Sebagai alat informasi dalam menghubungkan instansi dengan pihak-pihak yang berkepentingan adalah salah satu fungsi dari laporan keuangan (Patras, 2022).

Menurut Harahap kinerja keuangan telah menjadi indikator pengukur pencapaian dalam menggunakan sumber daya finansialnya yaitu aset, liabilitas, entitas dan juga pendapatan dalam suatu periode tertentu. Kinerja Keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pemerintahan untuk mengukur prestasi dan juga menggunakan modal secara efektif dan juga efisien demi tercapainya tujuan. Mengetahui posisi kinerja keuangan Lembaga sehingga dapat membantu pengambilan suatu keputusan bagi stakeholder yaitu ditektur, manajemen, dan juga karyawan serta stakeholder yaitu investor dan juga pengambil keputusan eksternal. Selain Itu, Pengelolaan keuangan daerah di banyak negara, dibutuhkan untuk mempromosikan sistem manajemen yang baik yang akan bekerja ke arah efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yang tepat yang hanya dapat diwujudkan melalui pengendalian internal yang efektif dan efisien (Aramide dan Bashir 2015).

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu Lembaga pada tanggal tertentu. Sedangkan laporan laba rugi memperlihatkan hasil yang telah dicapai serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas. (Munawir, 2016).

Adapun menurut Sukardi dan Kurniawan (2015) “tujuan laporan keuangan yaitu sebagai bahasa bisnis yang mudah dimengerti oleh semua pihak dan menunjukkan logika hubungan timbal balik antara pos-pos dalam laporan keuangan”.

Sedangkan tujuan utama dari laporan keuangan menurut (Fahmi, 2014) adalah “memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur- unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap Lembaga di samping pihak manajemen Lembaga.

Menurut Sukardi dan Kurniawan (2015) manfaat laporan keuangan adalah “bagi manajemen yaitu sebagai dasar untuk memberi kompensasi, bagi Pemilik Perusahaan yaitu Sebagai dasar untuk menilai peningkatan nilai lembaga, bagi Supplier yaitu Untuk mengetahui besarnya kemungkinan pembayaran hutang, bagi Bank yaitu sebagai bukti bahwa lembaga tersebut likuid dan mempunyai cukup modal kerja”.

Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Pada umumnya laporan keuangan terdiri atas tiga hal utama, yaitu neraca (*Balance Sheet*), laporan laba rugi (*Income Statement*), dan laporan perubahan modal (*Statement of Changes in Capital*).

Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan juga dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan-keuangan secara wajar.

Dari pembahasan di atas bisa diketahui bahwa Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Mengungkapkan informasi secara umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro.
- c) Menyajikan mengenai ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berjalan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d) Menyajikan informasi tentang dasar dari penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk

diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

- e) Menyajikan rincian dan penjelasan mengenai masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan didalam lembar muka laporan keuangan
- g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan dan dibutuhkan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2. Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan lembaga pemerintahan dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai pada masa lalu dan sekarang.

Munawir (2016) “menyatakan bahwa analisis laporan keuangan adalah keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan”.

Menurut Harahap (2013), “analisis laporan keuangan berarti menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain baik antara data

kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”.

Tujuan analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai Lembaga yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisis lebih lanjut sehingga akan dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil (Munawir, 2016).

Kasmir (2016) menguraikan 6 tujuan dari analisis laporan keuangan, yaitu:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan berkaitan dengan posisi keuangan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.

6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan pemerintahan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

3. Penilaian Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik, sehingga pemerintah berkewajiban meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan public (Risandy dkk, 2019).

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu faktor kunci guna mengembangkan suatu instansi secara efektif dan efisien. Penilaian kinerja juga memungkinkan para karyawan untuk mengetahui bagaimana prestasi kerja mereka, dan sejauh mana hasil kerja mereka dinilai oleh pimpinan. Kegiatan penilaian ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberi umpan balik kepada karyawan dalam pelaksanaan kerja mereka. Hal ini akan dapat memotivasi mereka untuk kemajuan-kemajuan mereka di masa yang akan datang.

Menurut Hani Handoko (2012), “Penilaian prestasi adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Dimana kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan

tentang pelaksanaan kerja mereka.” Anwar Prabu Mangkunegara (2013), mengemukakan bahwa “penilaian kinerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang pegawai melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang dimaksudkan”.

Penilaian kinerja menjadi alat yang seharusnya dapat membantu karyawan dan instansi mencapai tujuannya. Penilaian kinerja berfungsi sebagai alat komunikasi bagi karyawan dalam melihat hasil kerjanya, apakah targetnya tercapai atau tidak sehingga memengaruhi kesuksesan karirnya (Kaymaz, 2011). Selain itu, standar penilaian kinerja menjadi tanggung jawab pemerintahan untuk menetapkan suatu standar yang dapat meningkatkan kinerja pegawai. Proses penilaian kinerja yang efektif dalam organisasi harus mampu memberikan umpan balik yang diperlukan untuk karyawan dan mengambil tindakan untuk motivasi diri mereka (Ali et al. 2012).

Berdasarkan para pendapat di atas, maka pelaksanaan Penilaian kinerja di dalam suatu organisasi sangatlah penting karena dengan penilaian kinerja pihak manajemen dapat mengetahui tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan karyawannya, sesuai dengan potensi dan keterampilan dari karyawan tersebut.

Menurut Rudianto (2013), “Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai dalam menjalankan fungsinya mengelola aset secara efektif selama periode tertentu”.

Sedangkan, Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik, sehingga pemerintah berkewajiban meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan public (Risandy dkk, 2019).

Menurut Amelia (2020), tujuan pelaporan keuangan pemerintahan adalah untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecakupan posisi sumber dayaekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan jumlah posisi sumber dayaekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran dan penerimaannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitas serta kegiatannya dan memenuhi hasil kebutuhan kasnya.

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan selama periode berjalan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan suatu entitas pelaporan dalam mendanai aktivitas atau kegiatannya.

Menurut Sujarweni (2017) berikut ini manfaat dari kinerja keuangan, yaitu:

1. Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai pencapaian perdepartemen dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan secara keseluruhan.
3. Sebagai dasar penentuan strategi untuk masa yang akan datang.
4. Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan

Menurut Fahmi (2016) ada lima tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu Lembaga Secara umum, yaitu:

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang

sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dipertanggung jawabkan.

2. Melakukan perhitungan Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai Lembaga lainnya.

Metode yang paling umum digunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu:

- a. Time series analysis, yaitu membandingkan secara antarwaktu atau antar peroleh, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
- b. Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis dilakukan dengan cara bersamaan.

4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang di alami oleh perbankan tersebut.

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai macam permasalahan yang ditemukan Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka daicarikan solusi guna memberikan suatu input atau dimasukkan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

Menurut Hery (2018) Berdasarkan tekniknya, analisis kinerja keuangan dapat dibedakan menjadi sembilan macam, yaitu:

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih untuk menunjukkan perubahan dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif).
2. Analisis tren, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja. apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
3. Analisis persentase per komponen (*common size*), merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase

masing-masing komponen aset terhadap total aset; persentase masing-masing komponen utang dan modal terhadap passiva (total aset); persentase masing-masing komponen laba rugi terhadap penjualan bersih.

4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja selama dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6. Analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi.
7. Analisis perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari satu periode ke 11 periode berikutnya, serta sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor tersebut.
8. Analisis titik impas, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

9. Analisis kredit, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu permohonan kredit debitur kepada kreditor, seperti bank.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini ditampilkan dalam tabel 2.1 berikut:

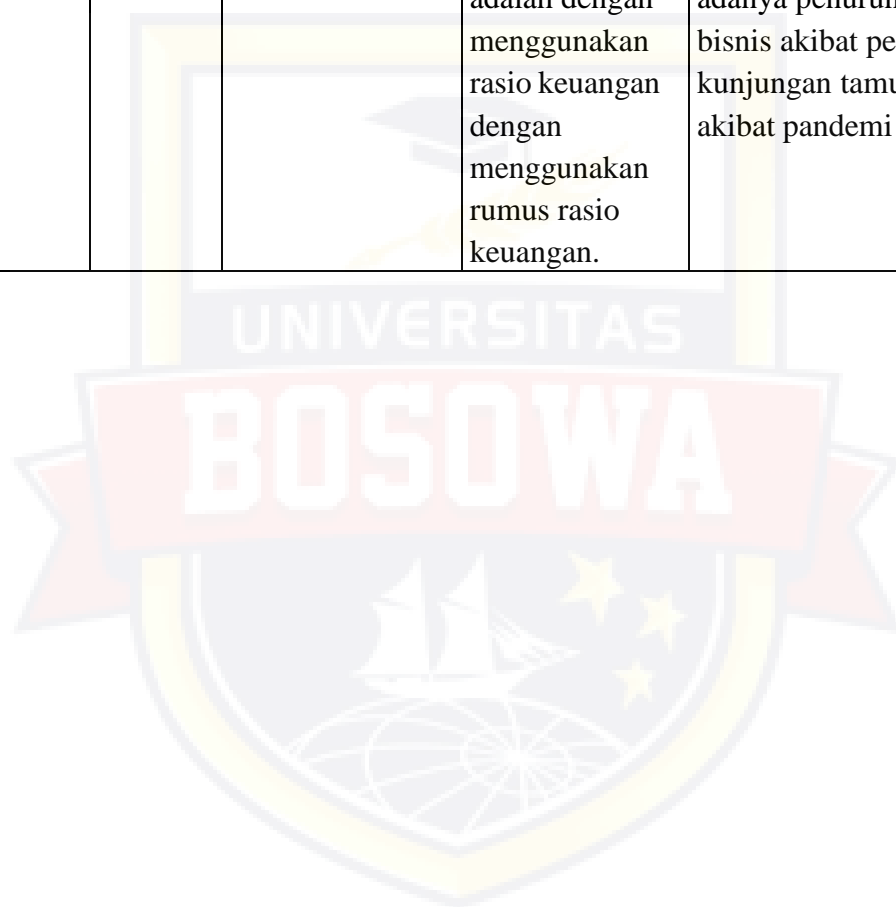
Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yuli Anriani	2019	Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Makassar Inti Motor (Dealer Resmi Honda) Jl. A.P Pettarani Kota Makassar	Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif	Hasil penelitian dari rasio likuiditas dilihat dari rasio lancar dan rasio tetap, perusahaan dalam keadaan yang baik, dari rasio solvabilitas dilihat dari rasio hutang terhadap aktiva dan rasio hutang terhadap ekuitas, perusahaan dalam kondisi sehat, dan dari rasio profitabilitas dilihat dari rasio margin laba kotor, margin laba bersih, margin laba operasi, rasio pengembalian asset, dan rasio pengembalian ekuitas, perusahaan dalam keadaan yang baik dan sehat dalam memperoleh keuntungan. Dan dari rasio aktivitas dilihat dari rasio perputaran aktiva, rasio perputaran modal kerja,

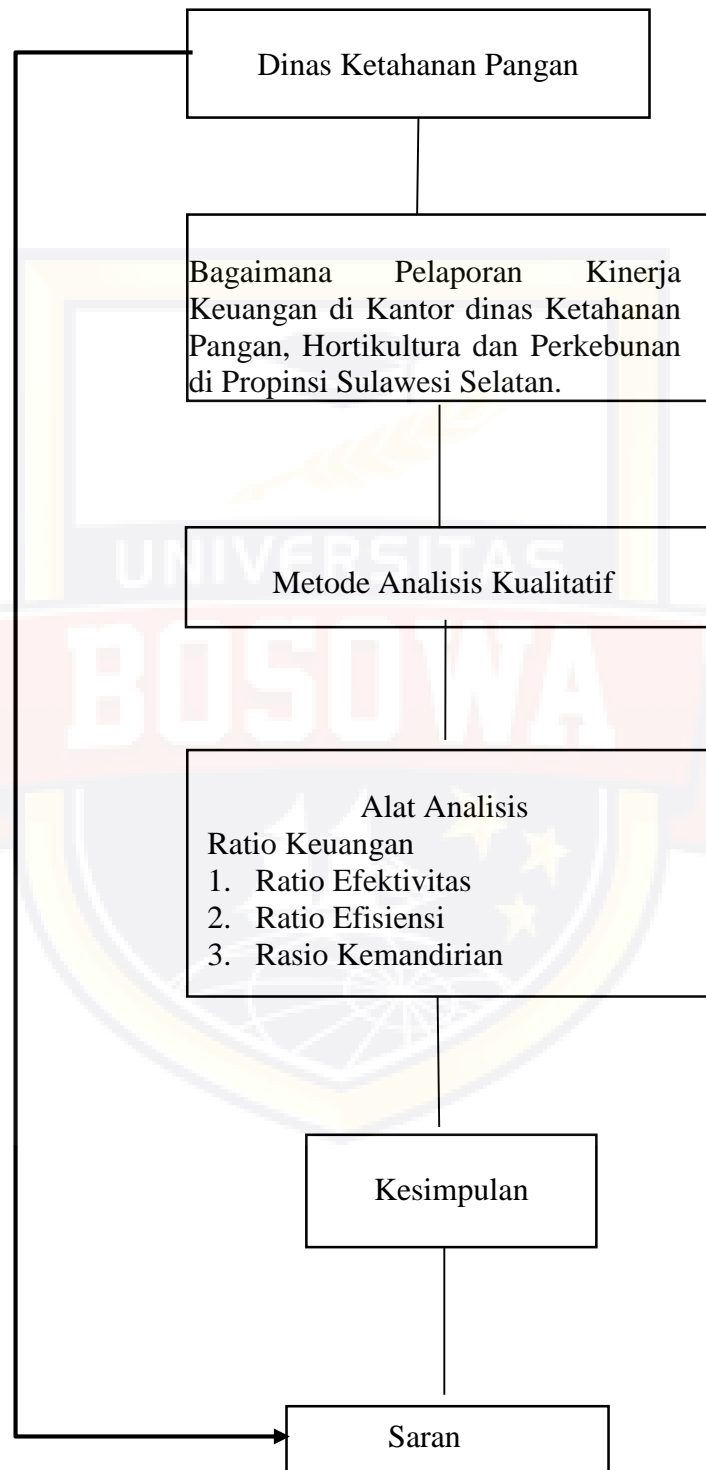
					rasio perputaran aktiva tetap, dan rasio perputaran persediaan, perusahaan dalam kondisi yang kurang baik karena persentase dalam rasio ini mengalami penurunan setiap tahunnya.
2	Risa Hasanah Nasution	2021	Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan PT KMI Wire Cable Tbk	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan tahun 2018 dan 2019 cukup baik. Solvabilitas perusahaan terlihat cukup baik, dimana perusahaan dapat memenuhi seluruh total kewajiban- kewajibannya apabila perusahaan mengalami Likuidasi
3	Ni Kadek Kori Pardiastuti, Nyoman Trisna Herawati	2020	Penilaian Kinerja Manajemen melalui Analisis Laporan Keuangan	Penelitian ini adalah penilaian kinerja manajemen dan analisis laporan keuangan. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja manajemen Friend's in Bali <i>Cycling Tour</i> berkembang dengan sangat baik. Melalui analisis laporan keuangan, kinerja manajemen perusahaan terlihat mengalami peningkatan aset berupa kendaraan dan bangunan. Perusahaan memiliki beberapa upaya dalam meningkatkan profit penjualannya. Adapun upaya yang dilakukan yaitu pertama melalui promosi online, dimana perusahaan bekerja sama dengan situs online

					seperti Airbnb dan Get Your Guide. Kedua melalui promosi offline, dimana perusahaan menyebarkan brosur tentang perusahaan ke hotel-hotel yang ada di Bali
4	Lisa Maiwardani	2019	Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perusahaan Pada Koperasi Serba Usaha	Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data adalah pengamatan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah: analisis likuiditas, analisis solvabilitas dan analisis profitabilitas.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sampai 2018 kinerja keuangan meningkat dan menurun. Hal ini karena jumlah faktor internal dan modal pinjaman terlalu tinggi. Ini berarti keuntungan yang dihasilkan oleh koperasi menurun. Jadi untuk periode berikutnya perusahaan harus mempertimbangkan jumlah faktor internal dan modal pinjaman dalam rangka mencapai tujuan perusahaan seperti yang diharapkan. Kesimpulan dari penelitian ini dengan mengurangi biaya yang mempengaruhi Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi usaha.
5	Dillah Nanda Tullah, Herminawati Abubakar, dan Indrayani Nur	2022	Analisis Kinerja Keuangan Pada Hotel Grand Azhara Di Jayapura	Penelitian ini menggunakan sumber data Sekunder berupa data keuangan LabaRugi Hotel Grand Azhara	berdasarkan hasil analisis, pada periode tersebut Kinerja keuangan 2018 - 2019 dalam hal likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan Aktivitas hotel Azhara menurun. Namun, rasio

				Hotel Tahun 2018-2020. Teknik analisis data yang	keuangan kembali meningkat pada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, kinerja
				digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rasio keuangan dengan menggunakan rumus rasio keuangan.	keuangan PT hotel Azhara bisa dikatakan sangat efektif. Hal ini disebabkan adanya penurunan aktivitas bisnis akibat penurunan kunjungan tamu hotel akibat pandemi



C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif merupakan kegiatan mengumpulkan, mengelola dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) objek dari data penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus

Fokus pada penelitian ini yaitu Analisis Pelaporan Penilaian Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden sebagai sampel penelitian yaitu berupa hasil angket. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari data-data yang hasil

olahan sebelumnya dalam bentuk dokumen atau laporan-laporan tertulis yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu berupa data laporan keuangan, jumlah karyawan dan profil Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akurat dalam suatu penelitian diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dan dokumentasi. Tujuan teknik wawancara dalam penelitian analisis pelaporan keuangan dinas ketahanan pangan, hortikultura, dan perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk memperoleh informasi dan data dari narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidang pelaporan keuangan dinas tersebut. Dengan teknik wawancara, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaporan keuangan dinas tersebut, termasuk tantangan, kekurangan, dan potensi peningkatan yang dapat dilakukan. Teknik wawancara juga dapat membantu peneliti untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari sumber lain dan memperoleh perspektif yang berbeda dari berbagai narasumber yang diwawancarai.

F. Teknik Analisis Data

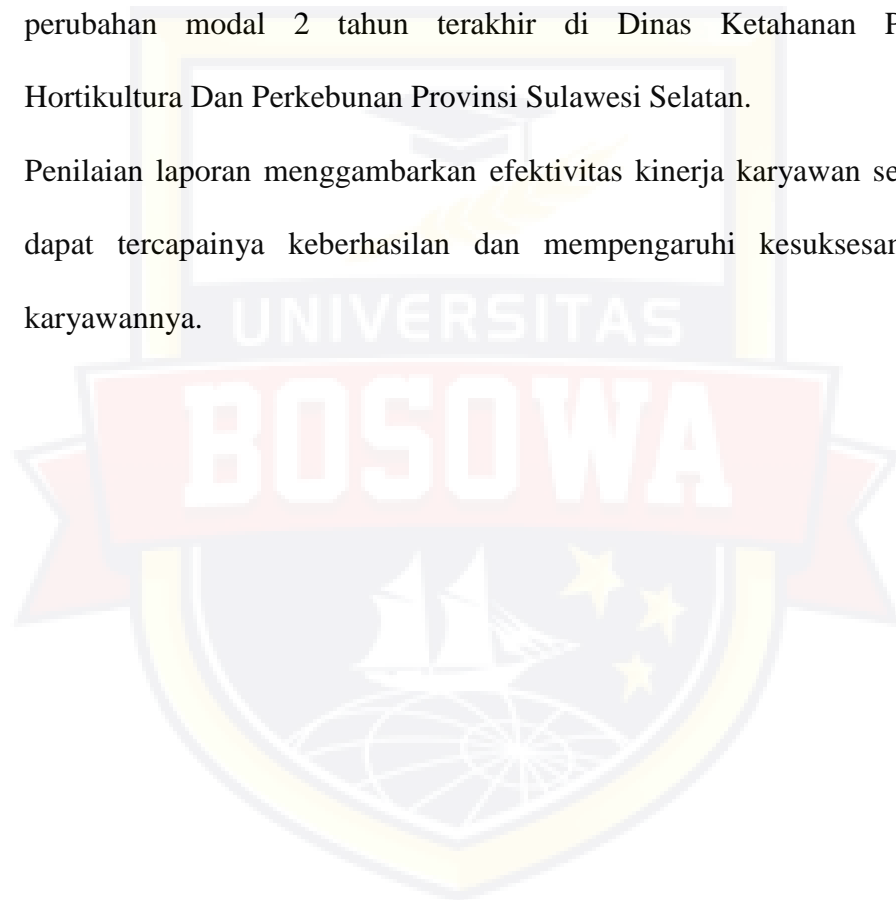
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data

yang diperoleh dalam penelitian. Dalam hal ini digunakan tabel distribusi frekuensi dan persentase.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang dimaksud adalah neraca, laporan laba rugi, dan perubahan modal 2 tahun terakhir di Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Penilaian laporan menggambarkan efektivitas kinerja karyawan sehingga dapat tercapainya keberhasilan dan mempengaruhi kesuksesan karir karyawannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah, dan Peraturan Gubernur atas unit kerja (UPT) setingkat eselon III sebanyak 6 unit yang berkedudukan di Kabupaten Maros (Balai Benih Tanaman Pangan, Balai Pengawasan Mutu Benih TPH, Balai Proteksi TPH), di Kota Makassar (Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Pelatihan Sumber Daya Manusia Pertanian), dan di Kabupaten Gowa (Balai Benih Tanaman Hortikultura).

Visi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan.

2. Peningkatan Kualitas Hasil Dan Daya Saing Produk Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Unggulan Daerah.
3. Pemenuhan Prasarana Dan Sarana Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan.

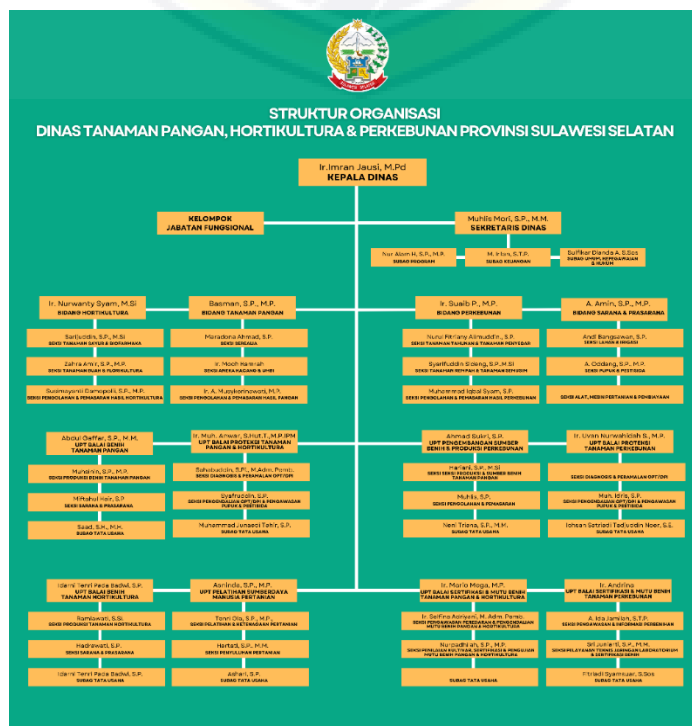
Misi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Peningkatan Kapasitas Produksi Dan Produktivitas Komoditi Utama Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan.
2. Penurunan Tingkat Kehilangan Hasil Saat Panen.
3. Penurunan Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
4. Peningkatan Penggunaan Benih Bermutu Dan Bersertifikat.
5. Ketersediaan Jaringan Irigasi Dan Jalan Usaha Tani.
6. Ketersediaan Peralatan Dan Mesin Pertanian Serta Ketersediaan Pupuk Bagi Petani.
7. Peningkatan Profesionalisme Kelembagaan Tani Dan Pendukung Usaha Tani.
8. Efektivitas Usaha Agribisnis Kelompok Tani.
9. Fasilitasi Aspek Permodalan Bagi Petani Dan Pelaku Usaha Pertanian.
10. Penguatan Kelembagaan Pertanian, Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Bab IV Pasal 5 menyatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Panga, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan. Sedang Organisasi Tata Kerja UPT pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 s/d 25 Tahun 2018.

Struktur Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan



Susunan Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Terdiri Atas Kepala dinas, Sekretaris dinas, Bidang Hortikultura, Bidang Tanaman Pangan, Seksi Tanaman Buah, dan Hortikultura, Seksi Aneka Kacang, Umbi, Seksi Pengelolaan, Pemasaran Hasil Hortikultura, Seksi Pengelolaan. Adapun Bagian UPT Balai Benih Tanaman Pangan, Seksi Produksi Benih Tanaman, Seksi sarana dan Prasarana, Subag Tata Usaha.

Selanjutnya Pada UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura, Seksi Diagnoses & Peramalan OPT, Seksi Pengendalian OPT. Bagian UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura Meliputi: Seksi Produksi Tanaman Hortikultura, Seksi Sarana dan Prasarana dan Sub Bag Tata Usaha. Adapun Bagian UPT Pelatihan Sumberdaya Manusia Pertanian Meliputi: Seksi Pelatihan, Seksi Penyuluhan dan Subag Tata Usaha. Adapun Struktur selanjutnya dimulai dari Sekretaris Dinas, Subag Program, Subag Keuangan, Subag Umum, Kepegawaian & Hukum. Selain Itu Adapun Pada Bidang Perkebunan, Meliputi: Seksi Tanaman Tahunan, Tanaman Penyegar, Seksi Tanaman Rempah, Tanaman Semusim, Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Perkebunan. Struktur Selanjutnya Pada Bidang Sarana dan Prasarana dengan Meliputi: Seksi Lahan, Irigasi, Seksi Pupuk dan Pestisida, dan Subbag Tata Usaha. Selanjutnya Pada UPT Balai Sertifikasi, Mutu Benih Tanaman Pangan, Hortikultura beserta Subbag Tata Usaha. UPT Terakhir yaitu Balai Sertifikasi dan Mutu Benih Tanaman Perkebunan Meliputi: Seksi Pengawasan, Informasi Pembenuhan, Seksi Pelayanan dan Teknis Jaringan Laboratorium dan Sertifikasi Benih beserta Subbag Tata Usaha.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Sistem Pelaporan Penilaian Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Oleh karenanya Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura dan sebagai alat ukur terhadap capaian keberhasilan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka instansi wajib menyusun Laporan Kinerja (LKJ) di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Bapak Muhammad Irfan “Sistem pelaporan penilaian kinerja keuangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan

Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan diimplementasikan melalui serangkaian langkah yang terdiri dari pengumpulan data keuangan, pengolahan data, penyusunan laporan, dan disampaikan kepada pihak terkait.” (Wawancara Pada Tanggal 20 Juni 2023).

2. Indikator Kinerja Keuangan Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Nilai capaian kinerja untuk sasaran 1 masih berada di peringkat sangat tinggi yaitu 92,78 %. Sasaran 1 ini didukung oleh 3 indikator utama yaitu NTP dengan capaian kinerja sebesar 99,48 %, jumlah produksi tanaman pangan dengan capaian kinerja sebesar 86,53 % dan jumlah produksi tanaman hortikultura dengan capaian kinerja sebesar 92,34 %.

Tabel. 4.1
Sistem Pelaporan Penilaian Kinerja Keuangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2019		%
				TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Produktifitas dan Daya saing Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	- NTP	%	103,59	103,05	99,48
		- Jumlah Produksi :		8.482.687	7.339.699	86,53
		- Padi	Ton	6.027.914	5.054.128	83,85
		- Jagung	Ton	2.438.350	2.285.571	93,73
		- Kedelai	Ton	16.423	10.830	65,94
		- Talas Satoimo	Ton	6.000	5.340	89,00
		- Jumlah Produksi :		161.291	148.932	92,34
		- Bawang Merah	Ton	95.563	101.762	106,49
		- Cabai Besar	Ton	27.803	21.055	75,73
		- Cabai Kecil	Ton	37.925	26.115	68,86
	RATA-RATA					92,78

Kalau melihat indikator pendukung sasaran 1, maka yang rendah kontribusinya adalah capaian produksi tanaman pangan. Hal ini disebabkan produksi ke 4 komoditas utama tersebut tidak ada yang mencapai 100 % yaitu padi 83,85 %, jagung 93,73 %, kedelai 65,94 % dan talas satoimo 68,86 %.

Menurut Bapak Muhammad Irfan Sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan “Capaian kinerja untuk sasaran 1 Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan masih berada di peringkat sangat tinggi, dengan persentase mencapai 92,78%. Sasaran ini didukung oleh tiga indikator utama, yaitu NTP, jumlah produksi tanaman pangan, dan jumlah produksi tanaman hortikultura. Meskipun demikian, terdapat perhatian yang perlu diberikan terhadap capaian produksi tanaman pangan, yang memiliki kontribusi rendah dalam mencapai sasaran tersebut. Produksi padi, jagung, kedelai, dan talas satoimo masih di bawah 100%. Upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian produksi pada komoditas-komoditas ini guna mendukung pencapaian sasaran secara keseluruhan”. (Wawancara Pada Tanggal 20 Juni, 2023).

Berdasarkan data kenaikan capaian kinerja dari tahun 2019 hingga 2021 untuk indikator terkait produksi tanaman pangan dan hortikultura, terdapat beberapa temuan yang perlu dianalisis. Salah satu indikator utama, yaitu NTP (Nilai Tukar Petani), menunjukkan peningkatan capaian kinerja sebesar 0.76% dari tahun sebelumnya, dengan mencapai 105.05% pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura. Produksi padi mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2019 hingga 2021, dengan kenaikan sebesar 101, 452 ton pada tahun 2021.

Di sisi lain, produksi jagung mengalami penurunan pada tahun 2020, tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2021. Sedangkan produksi

kedelai mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 hingga 2021. Hal ini menunjukkan perluasan upaya untuk meningkatkan produksi kedelai guna mencapai target yang ditetapkan. Dalam hal produksi hortikultura, produksi bawang merah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020, tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2021. Namun, produksi cabai besar dan cabai kecil mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2021.

Namun Secara keseluruhan, terdapat kenaikan capaian kinerja pada beberapa indikator, seperti NTP dan produksi padi, yang menunjukkan peningkatan produktivitas dan daya saing dalam sektor tanaman pangan dan hortikultura. Namun, terdapat juga indikator yang mengalami penurunan, seperti produksi jagung, kedelai, bawang merah, cabai besar, dan cabai kecil.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan produksi pada beberapa komoditas, terdapat juga indikator yang menunjukkan kenaikan capaian kinerja dalam sektor tanaman pangan dan hortikultura, seperti NTP (Nilai Tukar Petani) dan produksi padi. Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya peningkatan produktivitas dan daya saing dalam sektor tersebut. Namun, tantangan tetap ada dalam menghadapi fluktuasi produksi pada beberapa komoditas, dan perlu adanya upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan produksi dan menjaga kestabilan sektor pertanian secara keseluruhan.

Tabel. 4.2
Kinerja Indikator Kenaikan Padi di Kantor dinas Ketahanan
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN			2021 vs 2019 (%)	2021 vs 2020(%)
				2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Produktifitas dan Daya saing Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	a. NTP	%	103.05	104.29	105.05	2.18	0.74
		Jumlah Produksi :						
		b. Padi	Ton	5,055,279	5,952,676	6,054,128	-16.53	-15.09
		c. Jagung	Ton	2,851,337	2,239,862	2,285,571	-2.38	2.04
		d. Kedelai	Ton	16,101	17,140	10,830	-32.74	-36.81
		e. Talas Satoimo	Ton	-	-	5,340	-	-
		Jumlah Produksi :						
		f. Bawang Merah	Ton	129,181	92,392	101,762	-21.23	10.14
		g. Cabai Besar	Ton	32,289	26,944	21,055	-34.79	-21.86
		h. Cabai Kecil	Ton	45,770	36,569	26,115	-42.94	-28.59

3. Proses Pengumpulan Data Keuangan Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan akan mengidentifikasi sumber data keuangan yang relevan. Sumber data ini dapat mencakup sistem akuntansi internal, catatan transaksi, laporan keuangan, dan dokumen lain yang terkait dengan kegiatan keuangan kantor dinas. Setiap transaksi keuangan yang terjadi, seperti penerimaan pendapatan, pengeluaran, atau investasi, dicatat secara akurat dan terperinci. Pencatatan ini dapat dilakukan melalui sistem akuntansi yang telah ditetapkan atau dengan pencatatan manual, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Data keuangan yang tercatat akan diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan keakuratannya. Hal ini melibatkan pengecekan dokumen

pendukung, seperti faktur, bukti transaksi, dan konfirmasi dengan pihak terkait untuk memastikan kesesuaian dan keabsahan data. Data keuangan yang telah terverifikasi akan digabungkan ke dalam laporan keuangan yang komprehensif. Laporan keuangan ini akan mencakup informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, ekuitas, dan informasi keuangan lainnya sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku.

Laporan keuangan akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk memahami kinerja keuangan Kantor Dinas. Analisis ini mencakup perbandingan anggaran dengan realisasi, tren keuangan dari tahun ke tahun, rasio keuangan, dan informasi penting lainnya yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan.

Laporan keuangan yang telah dianalisis dan diinterpretasikan akan disusun dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi. Ini dapat berupa laporan keuangan tahunan, laporan keuangan triwulanan, atau laporan kinerja keuangan lainnya. Laporan-laporan ini akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk manajemen internal, pemangku kepentingan eksternal, dan pihak yang berwenang. Proses pengumpulan data keuangan juga melibatkan pengawasan dan audit internal maupun eksternal. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur, keakuratan data, dan ketaatan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Audit dapat dilakukan oleh auditor internal Kantor Dinas atau oleh pihak auditor independen guna memverifikasi integritas

dan keandalan data keuangan. Adapun Pendapat mengenai proses pengumpulan data keuangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Wawancaranya Adapun Sebagai berikut:

Menurut Ibu Nur Idah Amin Sebagai Staf Bagian Keuangan “Adapun Proses pengumpulan data keuangan yang dilakukan oleh Kantor Dinas merupakan langkah yang penting dan terstruktur. Mulai dari identifikasi sumber data, pencatatan transaksi, verifikasi dan validasi, hingga penggabungan data ke dalam laporan keuangan yang komprehensif. Melalui proses ini, Kantor Dinas memastikan bahwa data keuangan yang tercatat adalah akurat dan terpercaya. Data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk memahami kinerja keuangan Kantor Dinas serta membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan. Laporan keuangan yang telah disusun kemudian digunakan untuk pelaporan kepada pihak yang berkepentingan, seperti manajemen internal, pemangku kepentingan eksternal, dan pihak yang berwenang. Proses ini juga melibatkan pengawasan dan audit internal maupun eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar akuntansi yang berlaku.” (Wawancara Pada Tanggal 20 Juni, 2023).

Pengelolaan keuangan Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan beberapa aspek penting untuk memastikan pengeluaran dan penerimaan keuangan yang efektif, akurat, dan transparan. Adapun Hal yang menjadi Aspek dalam Pengelolaan Keuangan Kantor yang di sampaikan dalam Wawancaranya Sebagai Berikut:

Menurut Ibu Nur Idah Amin Sebagai Staf Bagian Keuangan Menyampaikan “Kantor Dinas perlu menyusun anggaran yang mencakup alokasi dana untuk berbagai kegiatan, proyek, atau program yang dilakukan. Anggaran ini disusun secara tahunan atau periode lainnya sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari penyusunan anggaran adalah mengatur pengeluaran dan penerimaan keuangan agar sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, Penting bagi Kantor Dinas untuk menerapkan

pengendalian intern yang efektif guna memastikan transaksi keuangan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengendalian intern melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, pemantauan, dan evaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan, kecurangan, atau penyalahgunaan dana. Bahkan, Kantor Dinas perlu mengelola risiko keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, investasi, atau faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan kantor dinas. Manajemen risiko keuangan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko yang mungkin timbul dan memastikan kelangsungan keuangan yang sehat.” (Wawancara Pada Tanggal 20 Juni, 2023).

Kantor Dinas harus menjaga keterbukaan dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Laporan keuangan yang disusun harus mencerminkan informasi keuangan yang akurat, jelas, dan tersedia untuk pemangku kepentingan eksternal seperti masyarakat, media, atau pemerintah. Pelaporan yang transparan membantu membangun kepercayaan dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan kantor dinas. Selain itu, Adapun tambahan informasi yang disampaikan dalam wawancaranya sebagai Berikut:

Menurut Ibu Idah “Kantor Dinas harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku dalam mengelola data keuangan. Ini mencakup peraturan mengenai pelaporan keuangan, pengungkapan informasi, pajak, dan aturan lain yang berkaitan dengan keuangan publik. Kepatuhan terhadap peraturan dan standar tersebut penting untuk menjaga integritas data keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku”. (Wawancara Pada Tanggal 20 Juni, 2023).

4. Standart dan Pedoman Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- h) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- i) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- j) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- k) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan;
- m) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- n) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46 tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan dan kapitalisasi Asset tetap.

Adapun Pendapat mengenai standar dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Wawancaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Chairuddin Makmur “Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan. Mereka mengacu pada undang-undang seperti UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Selain itu, mereka mengikuti peraturan pemerintah dan daerah, termasuk peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah, dan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, seperti peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah, juga diperhatikan. Kantor Dinas juga memperhatikan peraturan gubernur terkait penyusunan dan kapitalisasi aset tetap”. (Wawancara Pada 20 Juni 2023).

5. Keakuratan dan Keandalan Informasi Keuangan dalam Laporan Penilaian Kinerja serta Kontribusinya dalam Pengambilan Keputusan Terkait Alokasi Anggaran.

Laporan penilaian kinerja keuangan yang disusun oleh Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan menjaga keakuratan dan keandalan informasi keuangan dengan menggunakan proses pengumpulan data yang terpercaya, penggunaan standar akuntansi yang berlaku, serta melibatkan pengawasan dan audit internal maupun eksternal.

Dalam proses penyusunan laporan, kantor dinas memastikan bahwa sumber data keuangan yang relevan telah diidentifikasi dengan baik. Pencatatan transaksi dilakukan secara akurat dan terperinci, baik melalui sistem akuntansi maupun pencatatan manual yang telah ditetapkan. Data keuangan yang tercatat juga melalui proses verifikasi dan validasi dengan memeriksa dokumen pendukung yang relevan.

Selanjutnya, data keuangan yang telah terverifikasi digabungkan ke dalam laporan keuangan yang komprehensif sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Laporan keuangan ini mencakup informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan kantor dinas.

Laporan penilaian kinerja keuangan tersebut berkontribusi secara signifikan dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran. Dengan informasi keuangan yang akurat dan terpercaya, manajemen kantor dinas

dapat melakukan analisis dan evaluasi yang lebih baik terhadap kinerja keuangan mereka.

Selain itu, Laporan penilaian kinerja keuangan memberikan informasi tentang pendapatan yang diperoleh dan pengeluaran yang dilakukan oleh kantor dinas, serta membandingkannya dengan anggaran yang telah disahkan. Dengan demikian, manajemen dapat mengetahui sejauh mana kinerja keuangan mereka sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Menurut Bapak Chairuddin Makmur “Laporan penilaian kinerja keuangan yang disusun oleh Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keandalan dan keakuratan informasi keuangan. Melalui proses pengumpulan data yang terpercaya dan penggunaan standar akuntansi yang berlaku, laporan tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan kantor dinas. Dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran, laporan tersebut berkontribusi dengan menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya bagi manajemen dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja keuangan serta membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan”. (Wawancara Pada Tanggal 20 Juni 2023).

Laporan penilaian kinerja keuangan yang disusun oleh Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keandalan dan keakuratan informasi keuangan.

Laporan tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan kantor dinas dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran. Adapun Informasi yang di tambahkan dalam wawancaranya Oleh Bapak Chairuddin Makmur, Sebagai Berikut:

“Selain keandalan dan keakuratan informasi keuangan, data tambahan yang disajikan dalam laporan penilaian kinerja keuangan juga

sangat penting. Informasi tentang efisiensi pengeluaran mengindikasikan sejauh mana dana yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara optimal. Dengan data ini, Kantor Dinas dapat mengidentifikasi area-area di mana ada potensi penghematan atau peningkatan efisiensi. Pencapaian pendapatan juga merupakan informasi penting dalam laporan kinerja keuangan. Data tentang pendapatan mencerminkan keberhasilan Kantor Dinas dalam memperoleh sumber-sumber pendapatan yang diperlukan untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan. Analisis rasio keuangan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kinerja keuangan Kantor Dinas. Rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas dapat membantu dalam mengevaluasi stabilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan, dan efektivitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Perbandingan dengan benchmark juga sangat berarti dalam menilai kinerja keuangan. Membandingkan kinerja keuangan Kantor Dinas dengan standar atau rata-rata industri atau sektor yang relevan memberikan gambaran tentang sejauh mana kinerja keuangan kantor dinas berada dalam konteks yang lebih luas. Data perbandingan ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan relatif serta mengidentifikasi peluang perbaikan atau peningkatan kinerja. Terakhir, analisis tren dan proyeksi keuangan memberikan informasi tentang perubahan dalam kinerja keuangan Kantor Dinas dari waktu ke waktu. Data tren ini dapat digunakan untuk memprediksi arah dan tingkat pertumbuhan keuangan di masa depan,

sehingga mendukung perencanaan keuangan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis”. (Wawancara Pada Tanggal 20 Juni 2023).

Laporan penilaian kinerja keuangan yang disusun dengan keandalan dan keakuratan informasi keuangan merupakan langkah yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan Kantor Dinas. Melalui laporan ini, manajemen dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan dan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan terkait alokasi anggaran yang lebih efektif.

Dengan Data tambahan yang disampaikan, seperti informasi tentang efisiensi pengeluaran, pencapaian pendapatan, analisis rasio keuangan, perbandingan dengan benchmark, serta analisis tren dan proyeksi keuangan, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kinerja keuangan Kantor Dinas. Informasi tentang efisiensi pengeluaran membantu mengidentifikasi area-area yang memungkinkan penghematan atau peningkatan efisiensi pengeluaran.

Pencapaian pendapatan mencerminkan keberhasilan dalam memperoleh sumber-sumber pendapatan yang diperlukan untuk menjalankan program dan kegiatan. Analisis rasio keuangan memberikan gambaran tentang stabilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan, dan efektivitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Perbandingan dengan benchmark memungkinkan penilaian kinerja keuangan dalam konteks yang lebih luas. Sedangkan, analisis tren

dan proyeksi keuangan membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis. Dengan memperhatikan data tambahan tersebut, laporan penilaian kinerja keuangan menjadi lebih komprehensif dan memberikan panduan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran serta perencanaan keuangan. Dengan memanfaatkan informasi yang akurat dan relevan, Kantor Dinas dapat meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan pengeluaran, memaksimalkan pendapatan, dan merencanakan keuangan dengan lebih baik untuk mencapai tujuan dan tugasnya dalam menjalankan program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, hortikultura, dan perkebunan.

6. Tantangan dan Solusi Efektivitas Pelaporan Penilaian Kinerja Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaporan penilaian kinerja keuangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari beberapa tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi. Beberapa tantangan yaitu, Pelaporan keuangan harus mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang kompleks.

Dengan Mengikuti dan memahami semua ketentuan yang berlaku memerlukan pemahaman yang mendalam dan dapat memakan waktu. Pengumpulan Data yang Tepat dan Akurat, Dalam Memperoleh data keuangan yang tepat dan akurat dari berbagai sumber internal kantor dinas bisa menjadi tantangan. Koordinasi yang baik antara unit-unit terkait

dalam mengumpulkan data menjadi kunci untuk memastikan informasi yang akurat.

Penggunaan Sistem Akuntansi yang Efisien, Terkadang penggunaan sistem akuntansi yang tidak efisien atau kurang terintegrasi dapat menghambat proses pelaporan dan memperlambat analisis kinerja keuangan. Laporan penilaian kinerja keuangan memberikan informasi yang penting bagi manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait alokasi anggaran, penggunaan sumber daya, dan perencanaan keuangan jangka panjang.

Pelaporan keuangan yang teratur dan akurat membantu dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pengeluaran dan pendapatan. Hal ini meminimalkan risiko penyalahgunaan dan penyelewengan dana serta meningkatkan akuntabilitas.

Menurut Ibu Nur Idah Amin Sebagai Staf Bagian Keuangan “Laporan penilaian kinerja keuangan memberikan informasi objektif tentang pencapaian target dan sasaran keuangan. Dengan demikian, manajemen dapat melakukan evaluasi kinerja yang lebih baik, mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Pelaporan keuangan yang baik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kantor dinas. Pihak-pihak terkait, termasuk pemangku kepentingan eksternal, dapat memahami dengan jelas kondisi keuangan dan hasil kinerja kantor dinas”. (Wawancara Pada Tanggal 20 Juni 2023).

Meskipun pelaporan penilaian kinerja keuangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi tantangan yang signifikan, terdapat potensi untuk meningkatkan sistem pelaporan tersebut. Dengan komitmen yang kuat

untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, meningkatkan pengumpulan data yang tepat dan akurat, serta menggunakan sistem akuntansi yang efisien, kantor dinas dapat mengatasi tantangan tersebut.

Peningkatan koordinasi antara unit-unit terkait dan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan tersebut. Dalam hal ini, penerapan teknologi dan sistem informasi yang efektif juga dapat memperbaiki efisiensi pelaporan.

Laporan penilaian kinerja keuangan yang akurat dan terpercaya berperan penting dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran, pengawasan pengeluaran dan pendapatan, serta meningkatkan akuntabilitas. Dengan menjaga keakuratan dan keandalan informasi keuangan, Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dapat memperoleh manfaat yang signifikan dari pelaporan tersebut.

Dengan semangat untuk terus memperbaiki dan meningkatkan sistem pelaporan keuangan, kantor dinas dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pelaporan penilaian kinerja keuangan yang lebih baik akan memungkinkan kantor dinas untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengambil keputusan yang lebih tepat, dan menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Selain Tantangan Adapun Menjadi Opsi Solusi yang telah diterapkan dalam Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Implementasi dan Langkah Langkah yang telah diterapkan dalam Meningkatkan Pemahaman dan Kepatuhan Terhadap Perundang Undangan dan Memperbaiki Proses Pelaporan Keuangan Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Wawancaranya menyampaikan sebagai berikut:

Menurut Ibu Nur Idah Amin, “seorang staf bagian keuangan, berpendapat bahwa meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, memperbaiki proses pengumpulan data, meningkatkan efisiensi sistem akuntansi, meningkatkan koordinasi antara unit-unit terkait, menggunakan teknologi dan sistem informasi yang efektif, serta melakukan audit internal secara rutin adalah langkah-langkah penting yang telah diimplementasikan oleh Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya pelatihan dan workshop berkala, staf keuangan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan perundang-undangan terkait pelaporan keuangan. Hal ini akan membantu meningkatkan kepatuhan dan memastikan bahwa laporan penilaian kinerja keuangan mematuhi ketentuan yang berlaku”. (Wawancara Pada Tanggal 20 Juni 2023).

Selain Itu, Tambahan Informasi yang disampaikan Oleh Bapak Chairuddin Makmur yang berkaitan dengan Perbaikan dan Pengumpulan Data Keuangan Agar lebih Akurat,

Dalam wawancaranya Menyampaikan Informasi Sebagai Berikut:

“Melalui implementasi sistem informasi terintegrasi, Kantor Dinas dapat memperbaiki proses pengumpulan data keuangan, sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat dan efisien. Selain itu, dengan meninjau kembali sistem akuntansi yang digunakan, Kantor Dinas dapat memastikan bahwa sistem tersebut efisien dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan. Peningkatan koordinasi antara unit-unit terkait menjadi kunci dalam memastikan pengumpulan data yang akurat dan penyusunan laporan penilaian kinerja keuangan yang tepat waktu. Dengan adanya pertemuan rutin antara departemen terkait, Kantor Dinas dapat memfasilitasi komunikasi yang baik dan saling pemahaman untuk mencapai koordinasi yang efektif”.

Penerapan teknologi dan sistem informasi yang efektif memungkinkan Kantor Dinas untuk mengoptimalkan efisiensi pelaporan keuangan. Dengan otomatisasi proses pengumpulan data, analisis rasio keuangan, dan pembuatan laporan, waktu yang dihabiskan dapat diperpendek, sementara akurasi informasi keuangan dapat ditingkatkan.

Melakukan audit internal secara rutin merupakan langkah penting dalam memverifikasi keakuratan dan keandalan informasi keuangan. Dengan memiliki tim audit internal yang bertugas memeriksa dan mengawasi proses pelaporan keuangan secara berkala, Kantor Dinas dapat memastikan bahwa pelaporan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selain menjaga keakuratan informasi keuangan, audit internal juga berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Dengan mematuhi standar pelaporan keuangan yang ditetapkan, Kantor Dinas dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangannya.

Dalam Menerapkan teknologi dan sistem informasi yang efektif, bersama dengan praktik audit internal yang baik, dapat membantu Kantor Dinas dalam mengoptimalkan efisiensi dan keakuratan pelaporan keuangan. Dengan mengandalkan otomatisasi proses, analisis yang lebih cepat, dan pemeriksaan internal yang rutin, Kantor Dinas dapat memastikan bahwa laporan keuangannya sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pelaporan keuangan yang terorganisir dan sistematis.

1. Kantor Dinas mengidentifikasi sumber-sumber data keuangan yang relevan, seperti sistem akuntansi internal, catatan transaksi, laporan keuangan, dan dokumen lain yang terkait dengan kegiatan keuangan kantor dinas.
2. Setiap transaksi keuangan yang terjadi, baik itu penerimaan pendapatan, pengeluaran, atau investasi, dicatat secara akurat dan terperinci. Pencatatan dapat dilakukan melalui sistem akuntansi yang telah ditetapkan atau dengan pencatatan manual sesuai prosedur yang berlaku.
3. Data keuangan yang tercatat akan diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan keakuratannya. Hal ini melibatkan pengecekan dokumen pendukung, seperti faktur, bukti transaksi, dan konfirmasi dengan pihak terkait, guna memastikan kesesuaian dan keabsahan data.
4. Data keuangan yang telah terverifikasi akan digabungkan ke dalam laporan keuangan yang komprehensif. Laporan keuangan ini akan mencakup informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, ekuitas, dan informasi keuangan lainnya sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku.

5. Laporan keuangan akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk memahami kinerja keuangan Kantor Dinas. Analisis ini meliputi perbandingan anggaran dengan realisasi, tren keuangan dari tahun ke tahun, rasio keuangan, dan informasi penting lainnya yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan.
6. Laporan keuangan yang telah dianalisis dan diinterpretasikan akan disusun dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi. Ini dapat berupa laporan keuangan tahunan, laporan keuangan triwulanan, atau laporan kinerja keuangan lainnya.
7. Laporan keuangan akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk manajemen internal, pemangku kepentingan eksternal, dan pihak yang berwenang. Laporan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

B. Saran

1. Mengimplementasikan sistem akuntansi yang terintegrasi dan otomatis dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Dengan menggunakan sistem yang tepat, seperti perangkat lunak akuntansi yang canggih, dapat meminimalkan kesalahan manusia dan memastikan pencatatan yang akurat.
2. Memperkuat mekanisme pengawasan internal, termasuk pemeriksaan rutin terhadap pencatatan keuangan, dapat membantu memastikan keakuratan dan keabsahan data keuangan.

3. Melakukan analisis keuangan yang lebih mendalam dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang kinerja keuangan Kantor Dinas. Selain melakukan perbandingan anggaran dengan realisasi, juga perlu mempertimbangkan rasio keuangan yang relevan, tren keuangan jangka panjang, dan informasi penting lainnya yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan.
4. Pastikan laporan keuangan yang disusun dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi. Hal ini memungkinkan pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan. Selain itu, penting untuk memastikan laporan keuangan disampaikan secara tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan, baik itu manajemen internal, pemangku kepentingan eksternal, maupun pihak yang berwenang.
5. Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur dan prinsip akuntansi. Dengan demikian, mereka akan lebih kompeten dalam menjalankan tugas-tugas terkait keuangan dan mengurangi risiko kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali SB, Abzari M, Javani M. 2012. The effect of employees performance appraisal procedure on their intrinsic motivation. *International Journal of Academic Research in B*
- Anriani, Yuli. 2019. Skripsi. Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Makassar Inti Motor (Dealer Resmi Honda) Jl. A.P Pettarani Kota Makassar
- Aramide Sanusi Fasilat, Bashir Musthapa Muhammad, 2015. The Effectiveness of internal system and financial at local government level in Nigeria. *International Journal of Research in Bussiness Management (IMPACT : IJRBM)*. Vol. 3, Issue 8, Aug 2015, 1-6 ISSN (E) : 2321-886X ; ISSN (P) 2347-4527.
- Cetakan Ketiga. PT. Gramedia : Jakarta.
- Dahlia, Ruslan, M., & Yantahin, M. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pt. Maruki Makassar. *Economic Bosowa Journal*, 5(001).
- Dillah, N. T., Herminawati, A., & Indrayani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pada Hotel Grand Azhara Di Jayapura. *Economic Bosowa Journal*, 8(002).
- Edison Emron, Yohny Anwar, Imas Komariyah. (2017). *Manajemen Sumber aya Manusia*. Alfabeta, Bandung.
- Fahmi, I. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Alfabeta.
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Gumanti, Tatang. 2011. *Manajemen Investasi: Konsep, Teori, dan Aplikasi*.
- Handoko, H. (2012:135) *Manajemen Personalialia Dan Sumber Daya Manusia*.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2013. *Analisis Krisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Hery Susanto. 2019. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*.
- Hery. 2018. *Analisis Laporan Keuangan : Integrated and Comprehensive Edition*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: PT. Salemba Empat Patria.

Irfan Risandy, M. S., Menne, F., & Said, M. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Berbasis Value For Money Pada Unit Instansi Puskesmas Di Kabupaten Takalar. *Economics Bosowa Journal* , 5(003).

Jakarta: Mitra Wacana Media.

Javadi MHM, Amin SR. 2011. Effect of personal's performance assessment system (PPAS) on human resources productivity (HRP) in Isfahan Province telecommunication company. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business* 3(2): 843–848.

Kasmir. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Keown, Arthur J. 2014. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT. Macanan.

Kaymaz K. 2011. Performance feedback: individual based reflections and the effect on motivation. *Business and Economics Research Journal*. *Berjournal* 2(4): 115–134.

Kuvaas, B. (2007) Different Relationships between Perceptions of Developmental Performance Appraisal and Work Performance. *Personnel Review*, 36, 378-397.

Mangkunegara, A. (2013:244) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Munawir, S. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.

Nasution , Risa Hasanah . 2021. Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan PT KMI *Wire Cable* Tbk. *Jurnal Ilmu manajemen Terapan*. Vol 2 No 3.

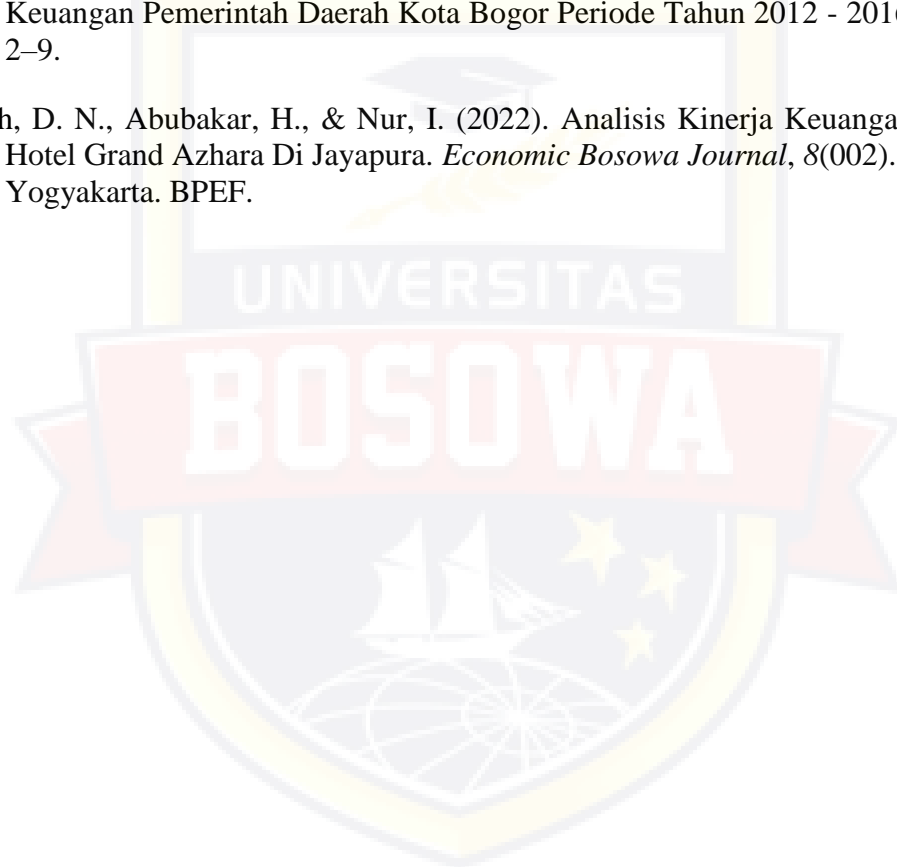
Pardiastuti , Ni Kadek Kori dan Nyoman Trisna Herawati . 2020. Penilaian Kinerja Manajemen melalui Analisis Laporan Keuangan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol 8 no 2.

Patras, Stevany Natalia. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpkn) Makassar Di Masa Pandemi Covid-19. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

Renaldy, Ade. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Taksi Bandara Sultan Hasanuddin. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.

- Rusmantika, S., Darmawati, & Thanwain. (2016). Analisislaporan Keuangan Pemerintahkotamakassar Sulawesi Selatan. *Economic Bosowa Journal*2016.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2017). Analisis Laporan Keuangan : Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukardi, David dan Kurniawan Indonan jaya. 201. Manajemen Investasi Pendekatan Teknikal dan Fundamental untuk Analisis Saham. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susilowati, I. H., Retnowulan, J., & Widiyanti, W. (2018). Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Periode Tahun 2012 - 2016, 2(2), 2–9.
- Tullah, D. N., Abubakar, H., & Nur, I. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pada Hotel Grand Azhara Di Jayapura. *Economic Bosowa Journal*, 8(002). Yogyakarta. BPEF.





LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

☒ Jl. Amirullah No.1 ☎ 854796 – 854913 - 854662 Fax854494-854662

MAKASSAR

KodePos: 90131

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 074 / 3046 / DTPH - Bun

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : M. IRFAN, S.T.P.,M.Si
Nip : 19870928 201101 1 003
Pangkat/Gol : PENATA Tk.I / IIIId
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Alamat : JL. AMIRULLAH NO.1

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : IDITH GAVRILLA TANDIONGAN
Nim : 4519013067
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Program Studi : AKUNTANSI
No.Hp : 082150322503

Berdasarkan surat permohonan izin melakukan penelitian dan pengambilan data dari UNIVERSITAS BOSOWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS dengan nomor : A/FEB/UNIBOS/III/2023 tanggal 03 April 2023 maka Kantor Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan Provinsi SulSel telah menerima saudara tersebut untuk melakukan Penelitian di Kantor kami, dengan judul Analisis Pelaporan Penilaian Kinerja Keuangan di Kantor Dinas Tanaman pangan,Hortikultura dan Perkebunan Provinsi SulSel. Selanjutnya Saudara tersebut kami nyatakan telah selesai melakukan penelitian di Kantor Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi SulSel dengan judul yang telah diajukan sebagai bahan penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 26 Juni 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan



Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

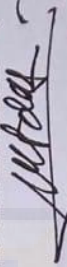
 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020						
NO	URAIAN	ANGGARAN 2021		REALISASI 2021		REALISASI 2020
		3	4	5	6	
1	PENDAPATAN DAERAH	4.945.250.000,00	4.961.479.343,00	100,33	4.767.302.681,00	
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.945.250.000,00	4.961.479.343,00	100,33	4.767.302.681,00	
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Pendapatan Retribusi Daerah	4.945.250.000,00	4.961.479.343,00	100,33	4.767.302.681,00	
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
7						
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	
15						
16	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00	
19						
20	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021			REALISASI 2021		REALISASI 2020	
		3	4	5	6	7	8	
23								
24	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH							
25	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Pendapatan Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28								
29	Jumlah	4.945.250.000,00	4.961.479.343,00	100,33	4.767.302.681,00			
30								
31	BELANJA DAERAH	565.329.500.578,00	478.905.091.931,18	84,71	254.307.949.090,71			
32								
33	BELANJA OPERASI	546.430.246.294,00	462.921.667.559,61	84,72	241.062.052.297,71			
34	Belanja Pegawai	79.081.065.069,00	77.758.706.529,00	98,33	75.388.220.259,00			
35	Belanja Barang dan Jasa	466.949.181.225,00	384.970.551.030,61	82,44	165.673.832.038,71			
36	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Belanja Hibah	400.000.000,00	192.410.000,00	48,10	0,00	0,00	0,00	
39	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40								
41	BELANJA MODAL	18.899.254.284,00	15.983.424.371,57	84,57	13.245.896.793,00			
42	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.970.393.850,00	4.646.656.104,00	93,49	4.649.893.084,00			
44	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.927.957.434,00	7.614.213.394,00	76,69	8.104.587.709,00			
45	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.001.234.000,00	2.722.885.873,57	90,73	91.500.000,00			
46	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	999.669.000,00	999.669.000,00	100,00	399.516.000,00			
48	BELANJA BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00			

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021		REALISASI 2021		REALISASI 2020	
		3	4	5	6		
75	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76							
77							
78	PENGELUARAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83							
84	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85							
86	Pembiayaan neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87							
88	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(560.384.250,578,00)	(473.943.612,588,18)	189,93	(249.540.646,409,71)		

Makassar, 31 Desember 2021

Pit. KEPALA DINAS



Drs. MUHAMMAD FIRDA, M.Si

19631231 198803 1 132


Lampiran 3 Laporan Operasional

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020							
NO	URAIAN	2021		2020		Penaikan / (Penurunan)	(%)
		3	4	5	6		
1	PENDAPATAN						
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.961.479.343,00	4.767.302.681,00	194.176.662,00	4.07		
3	Pendapatan Pajak Daerah	4.961.479.343,00	4.767.302.681,00	194.176.662,00	4.07		
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.961.479.343,00	4.767.302.681,00	194.176.662,00	4.07		
6	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	4.961.479.343,00	4.767.302.681,00	194.176.662,00	4.07		
8							
9	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	JUMLAH PENDAPATAN	4.961.479.343,00	4.767.302.681,00	194.176.662,00	4.07		
15							
16	BEBAN	407.528.595.169,12	335.896.195.087,23	71.632.400.081,89	21.33		
17	BEBAN OPERASI	407.528.595.169,12	335.896.195.087,23	71.632.400.081,89	21.33		
18	Beban Pegawai	76.704.484.192,00	78.548.797.186,00	(1.844.312.994,00)	(2.35)		
19	Beban Persediaan	297.802.656.043,33	9.086.963.085,00	288.715.692.958,33	3.177.25		

NO	URAIAN	2021				2020		Penaikan / (Penurunan)	6
		3	4	5	6	5	6		
20	Beban Jasa	11.204.240.583,00	16.426.850.245,00	(5.222.609.662,00)			(31.79)		
21	Beban Pemeliharaan	1.930.641.383,00	3.226.576.000,00	(1.295.934.617,00)			(40.16)		
22	Beban Perjalanan Dinas	8.995.887.194,00	15.301.183.340,00	(6.305.296.146,00)			(41.21)		
23	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00			0,00		
24	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00			0,00		
25	Beban Hibah	192.410.000,00	205.174.640.015,41	(204.982.230.015,41)			(99.91)		
26	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00			0,00		
27	Beban Penyusutan	10.348.847.773,79	8.131.185.215,82	2.217.662.557,97			27.27		
28	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00			0,00		
29	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00			0,00		
30	Beban Lain-lain	349.428.000,00	0,00	349.428.000,00			0,00		
31	Jumlah Beban Operasi	407.528.595.169,12	335.896.195.087,23	71.632.400.081,89			21.33		
32									
33	BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00			0,00		
34	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00			0,00		
35	JUMLAH BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00			0,00		
36	JUMLAH BEBAN	407.528.595.169,12	335.896.195.087,23	71.632.400.081,89			21.33		
37									
38	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	(402.567.115.826,12)	(331.128.892.406,23)	(71.438.223.419,89)			21.57		
39									
40	SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	412.490.074.512,12	340.663.497.768,23	71.826.576.743,89			21.08		
41	SURPLUS NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00			0,00		
42	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00			0,00		

NO	URAIAN	2021		2020		Penaikan / (Penurunan)	(%)
		3	4	5	6		
1	2						
43	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jumlah Surplus Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46							
47	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Defisit Penghapusan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Jumlah Defisit Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54							
55	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(402.567.115.826,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Jumlah Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SURPLUS/ DEFISIT - LO	(402.567.115.826,12)	(331.128.892.406,23)	(71.438.223.419,89)	0,00	0,00	21,57

Lampiran 4 Laporan Neraca

		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020	
		2021	2020
NO	URAIAN	3	4
1	2		
1	ASET	265.266.999.003,44	248.511.476.620,98
2	ASET LANCAR	427.732.584,00	279.168.750,00
3	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas di BLUD	0,00	0,00
7	Kas di BOS	0,00	0,00
8	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
9	Investasi dalam Saham	0,00	0,00
10	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
11	Piutang Pajak	0,00	0,00
12	Piutang Retribusi	0,00	0,00
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
14	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
15	Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
16	Piutang Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
17	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
18	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
19	Uang Muka	0,00	0,00
20	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
21	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
22	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
23	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
24	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
25	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
26	Piutang Lainnya	0,00	0,00
27	Piutang Badan Layanan Umum Daerah	0,00	0,00
28	Persediaan	427.732.584,00	279.168.750,00
29	Jumlah Aset Lancar	427.732.584,00	279.168.750,00
31	Investasi Nonpermanen	0,00	0,00
32	Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00
33	Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00
34	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
35	Investasi Nonpermanen Lainnya	0,00	0,00
36	Jumlah Investasi Nonpermanen	0,00	0,00
37	Investasi Permanen	0,00	0,00
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
39	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
40	Jumlah Investasi Permanen	0,00	0,00
41	Jumlah Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
42	ASET TETAP	257.361.104.027,27	241.663.688.037,98
43	Tanah	131.698.496.000,00	132.393.071.000,00
44	Peralatan dan Mesin	88.447.743.128,00	63.686.833.874,00
45	Gedung dan Bangunan	99.558.439.736,21	84.139.521.893,21
46	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.974.105.383,57	12.401.219.510,00

NO	URAIAN	2021	2020
1	2	3	4
47	Aset Tetap Lainnya	1.854.208.199,50	1.854.208.199,50
48	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	16.020.221.645,04
49	Akumulasi Penyusutan	(79.171.888.420,01)	(68.831.388.083,77)
50	Jumlah Aset Tetap	257.361.104.027,27	241.663.688.037,98
51			
52	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
53	ASET LAINNYA	0,00	0,00
54	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
55	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
56	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	720.090.000,00	0,00
57	Aset Tak Berwujud	4.302.399.500,00	4.104.599.500,00
58	Aset Lain-lain	2.481.122.000,00	2.481.122.000,00
59	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(25.449.107,83)	(17.101.667,00)
60	Jumlah Aset Lainnya	7.478.162.392,17	6.568.619.833,00
61			
62	JUMLAH ASET	265.266.999.003,44	248.511.476.620,98
63			
64	KEWAJIBAN	39.630.601.951,42	94.466.348.394,74
65			
66	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	39.630.601.951,42	94.466.848.394,74
67	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
68	Utang Bunga	0,00	0,00
69	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
70	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
71	Utang Beban	39.630.601.951,42	94.466.848.394,74
72	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
73	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	39.630.601.951,42	94.466.848.394,74
74			
75	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
76	Utang Jangka Panjang Non Perbankan	0,00	0,00
77	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
78	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
79	JUMLAH KEWAJIBAN	39.630.601.951,42	94.466.848.394,74
80	EKUITAS	225.636.397.052,02	154.044.628.226,24
81	Ekuitas	(248.307.215.536,16)	38.688.973.418,53
82	RK PPKD	473.943.612.588,18	115.355.654.807,71
83	JUMLAH EKUITAS	225.636.397.052,02	154.044.628.226,24
84			
85	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	265.266.999.003,44	248.511.476.620,98

Lampiran 5 Laporan Perubahan Ekuiditas

		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020	
NO	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	38.688.973.418,53	85.306.461.412,21
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(402.567.115.826,12)	(331.128.892.406,23)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	0,00	0,00
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	(1.086.002.200,00)
5	Rekening Konsolidasi(RK)	115.355.654.807,71	285.071.727.206,50
6	Koreksi Aset Tetap	0,00	520.450.000,00
7	Koreksi Piutang	0,00	0,00
8	Koreksi Penyisihan Piutang	0,00	0,00
9	Koreksi Penyusutan Aset Tetap	(3,28)	0,05
10	Koreksi Aset Lainnya	0,00	0,00
11	Koreksi Penyusutan Aset lainnya	0,00	(17.101.667,00)
12	Koreksi Pinjaman Modal	0,00	0,00
13	Koreksi Investasi	0,00	0,00
14	Koreksi Hutang	3.950.750,00	22.331.073,00
15	Koreksi Pendapatan LO	0,00	0,00
16	Koreksi Amortisasi	0,00	0,00
17	Koreksi Hibah	0,00	0,00
18	Koreksi Amortisasi	0,00	0,00
19	Koreksi Asuransi	0,00	0,00
20	Koreksi Pengembalian sisa kas	0,00	0,00
21	EKUITAS AKHIR	(248.518.536.853,16)	38.688.973.418,53

Makassar, 31 Desember 2021
 Dit. KEPALA DINAS

 Drs. MUHAMMAD FIRDA, M.Si
 19631231 198803 1 132

Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran 2020

**Laporan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2020**

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)	
					Keu	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAPATAN DAERAH	3.827.651.520,00	4.767.302.681,00		124,54	
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.827.651.520,00	4.767.302.681,00	(939.651.161,00)	124,54	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	477.651.520,00	567.277.396,00	(89.625.876,00)	118,76	100,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.350.000.000,00	4.200.025.285,00	(850.025.285,00)	125,37	100,00
	Meningkat Hasil Penjualan Produksi Benih Tanaman Pangan dan hasil Perkebunan sehingga pendapatan dapat melebihi dari target yang ditetapkan					
B	BELANJA DAERAH	386.279.352.004,00	254.307.949.090,71	131.971.402.913,29	65,83	100,00
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	78.769.170.679,00	75.388.220.259,00	3.380.950.420,00	95,70	100,00
	BELANJA PEGAWAI	78.769.170.679,00	75.388.220.259,00	3.380.950.420,00	95,70	100,00
	Gaji dan Tunjangan	40.699.587.423,00	40.583.869.372,00	115.718.051,00	99,71	100,00
	Tambahan Penghasilan PNS	38.069.583.256,00	34.804.350.887,00	3.265.232.369,00	91,42	100,00
	Tidak Terealisasi karena Tunjangan Kinerja Pegawai Untuk bulan Desember Belum terbayarkan					
II	BELANJA LANGSUNG	307.510.181.325,00	178.919.728.831,71	128.590.452.493,29	58,18	100,00
1	PROGRAM HILIRISASI PERTANIAN (PRIORITAS)	79.527.296.900,00	40.031.599.691,00	39.830.656.458,00	50,33	100,00
	Pengembangan Jaringan Irigasi	43.643.596.900,00	27.812.940.442,00	15.830.656.458,00	63,72	100,00
	Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran					
	Pengadaan Alisintan Pasca Panen	35.883.700.000,00	17.218.659.249,00	23.665.040.751,00	34,05	100,00
	Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran					
2	PROGRAM HILIRISASI PERKEBUNAN (PRIORITAS)	280.000.000,00	277.502.240,00	2.497.760,00	99,10	100,00
	Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	280.000.000,00	277.502.240,00	2.497.760,00	99,10	100,00
3	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	21.556.270.800,00	5.569.806.120,00	15.986.464.680,00	25,83	100,00
	Peningkatan Produksi dan Pengembangan Umbu-Umbian	6.803.701.000,00	2.240.954.940,00	4.562.746.060,00	32,93	100,00

	Mesin Pertanian					
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	Penyediaan Pupuk dan Pestisida	34.031.080.000,00	27.311.709.315,71	6.719.370.684,29	80,25	100,00
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
7	PROGRAM PENYEDIAAN BENIH BERMUTU PENGENDLIAN OPT DAN STATISTIK PERTANIAN	2.996.544.000,00	1.953.269.600,00	1.043.274.400,00	65,18	100,00
	Sertifikasi dan Pelabelan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	270.000.000,00	243.659.700,00	26.340.300,00	90,24	100,00
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	70.000.000,00	69.040.000,00	960.000,00	98,62	100,00
	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	337.000.000,00	172.662.800,00	164.337.200,00	51,23	100,00
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	Peramalan dan Pengamatan Sebaran OPT dan DPI	930.650.000,00	626.981.500,00	303.668.500,00	67,37	
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	Gerakan Pengendalian OPT	1.322.894.000,00	802.683.800,00	520.210.200,00	60,67	
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	66.000.000,00	38.241.800,00	27.758.200,00	57,94	
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
8	PROGRAM PENYULUHAN DAN PELATIHAN SDM PERTANIAN	526.800.000,00	514.689.800,00	12.110.200,00		100,00
	Peningkatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Penyuluhan	130.000.000,00	125.396.000,00	4.604.000,00	96,45	100,00
	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Pertanian	70.000.000,00	65.541.500,00	4.458.500,00	93,63	100,00
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	Pembinaan, Pengembangan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	326.800.000,00	323.752.300,00	3.047.700,00	99,06	100,00
9	PROGRAM FASILITASI PRASARANA DAN SARANA BERBANTUAN	4.152.491.000,00	2.817.316.663,00	1.335.174.367,00	67,84	100,00
	Peningkatan Produktivitas Pertanian Beririgasi Melalui Program IPDMIP	1.891.765.000,00	1.476.421.856,00	415.343.144,00	78,04	100,00
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	Perluasan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian Melalui Proyek READ-SI (PHLN)	2.260.726.000,00	1.340.894.777,00	919.831.223,00	59,31	100,00

10	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN	58.150.140.000,00	42.155.958.708,00	15.994.183.292,0	72,49	100,00
	IntensifikasiTanamanKakao	13.572.400.000,00	4.739.195.346,00	9.193.204.654,00	34,91	100,00
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	IntensifikasiTanaman Kopi	10.250.000.000,00	10.010.825.000,00	239.175.000,00	97,66	100,00
	IntensifikasiTanamanCengkeh	6.500.000.000,00	6.430.468.710,00	69.531.290,00	98,93	100,00
	IntensifikasiTanaman Lada	3.625.000.000,00	862.800.249,00	2.762.199.751,00	23,80	100,00
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	Pengendalian OPT TanamanKakao	350.000.000,00	345.569.360,00	4.430.640,00	98,73	
	DemplotKonservasi Air dan AntisipasiAnomali Iklim	2.130.000.000,00	606.259.450,00	1.523.740.550,00	28,46	
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	PengadaanBibitKomoditiUnggulan Perkebunan	15.982.000.000,00	15.671.226.310,00	310.773.690,00	98,05	
	PengadaanPupukOrganik	1.900.000.000,00	71.815.000,00	1.828.185.000,00	3,77	
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	PemeliharaanTanamanSumber Benih dan Produksi	2.890.740.000,00	2.859.524.697,00	31.225.303,00	98,92	
	PeningkatanKualitasBahan Baku Tembakau	950.000.000,00	918.282.586,00	31.717.414,00	96,66	
11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBGAAAN DAN SARANA PRASARANA PERKEBUNAN	7.266.900.000,00	4.488.854.444,00	2.778.045.556,00	61,77	100,00
	PengawasanPeredaranBenih Perkebunan	930.760.000,00	922.647.044,00	8.112.956,00	99,12	100,00
	PengadaanJembatan Jalan ProduksiKebunSumberBenih dan Produksi	4.513.640.000,00	3.001.501.340,00	1.512.138.660,00	66,49	100,00
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	Pengadaan Alat Pertanian Kecil (UPT-PSBP2)	1.122.500.000,00	83.297.060,00	1.030.202.940,00	7,42	100,00
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	PengadaanKonstruksiPagarKebunSumberBenih dan Produksi	300.000.000,00	284.625.000,00	15.375.000,00	94,87	
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	OrientasiPetugas dan PetanikeSumberBahanTanaman Perkebunan	400.000.000,00	196.784.000,00	203.216.000,00	49,19	
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
12	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	12.310.814.200,00	10.565.698.300,00	1.745.115.900,00	85,82	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya air dan Listrik	1.723.947.000,00	1.241.359.730,00	484.587.270,00	72,00	100,00
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						

	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	60.500.000,00	4.593.450,00	55.906.550,00	7,59	100,00
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	7.900.800.000,00	7.798.600.000,00	102.200.000,00	98,70	100,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	526.452.200,00	289.174.100,00	237.278.100,00	54,92	100,00
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.421.264.000,00	614.101.000,00	807.163.000,00	43,20	
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	677.851.000,00	617.870.020,00	59.980.000,00	91,25	
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
13	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.858.546.000,00	1.594.698.641,00	1.263.848.159,00	55,78	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala/Gedung Kantor/Asrama	2.203.368.000,-	944.054.884,00	1.259.313.116,00	42,84	100,00
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	655.178.800,-	650.643.757,00	4.535.043,00	99,30	100,00
14	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	3.152.938.125,00	1.499.999.450,00	1.652.938.675,00	47,57	100,00
	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	412.738.125,00	350.149.300,00	62.588.825,00	84,83	100,00
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	Pengumpulan Data Publikasi Data dan Informasi OPD	2.590.200.000,00	999.920.150,00	1.590.279.850,00	38,60	100,00
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						
	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	150.000.000,00	149.930.000,00	70.000,00	99,95	
15	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1.237.339.000,00	685.478.300,00	551.860.700,00	55,39	100,00
	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1.237.339.000,00	685.478.300,00	551.860.700,00	55,39	100,00
Tidak Terealisasi Karena SP2D belum Terbit Hingga akhir Tahun Anggaran						

Lampiran 7 Laporan Realisasi Anggaran 2021

Laporan Realisasi Anggaran Program/Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021						
No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)	
					Keu	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAPATAN DAERAH	4.945.250.000,00	4.961.479.343,00	(16.229.343,00)	100,33	
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.945.250.000,00	4.961.479.343,00	(16.229.343,00)	100,33	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	452.000.000,00	558.675.286,00	(106.675.286,00)	123,60	100,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.493.250.000,00	4.402.804.057,00	90.445.943,00	97,98	100,00
	Target Pendapatan yang tidak tertagih hingga akhir tahun 2021 antara lain sewa lahan dan penjualan produksi daerah berupa benih padi disebabkan karena cuaca sehingga mengalami kegagalan panen					
B	BELANJA DAERAH	563.329.500.578,00	478.905.091.931,18	86.424.408.646,82	84,71	
I	BELANJA OPERASI	546.430.246.294,00	462.921.667.559,61	83.508.578.734,39	84,72	
II	BELANJA MODAL	18.899.254.284,00	15.983.424.371,57	2.915.829.912,43	84,57	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	97.630.363.053,00	91.753.725.071,00	5.876.637.982,00	93,98	
a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.281.245.500,00	2.853.485.719,00	427.759.781,00	86,96	
	Masukan	Anggaran yang Terelarisasi Rp.2.853.485.719,00				
	Keluaran	Ketersediaan Dokumen RKA dan DPA SKPD				
	Hasil	Terepnuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu (86,96%)				
	Sumber Dana	Pendapatan Asli Daerah				
	Lokasi	Provinsi dan UPTD Dinas				
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	501.081.000,00	397.828.919,00	103.252.081,00	79,39	100,00
	Penyerapan anggaran Tidak maksimal karena tidak terbitnya SPD hingga akhir Tahun anggaran di beberapa Kegiatan					
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	116.250.000,00	90.000.000,00	26.250.000,00	77,42	100,00
	Penyerapan anggaran Tidak maksimal karena tidak terbitnya SPD hingga akhir Tahun anggaran di beberapa Kegiatan					
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-	165.600.000,00	165.600.000,00	0,00	100,00	100,00

SKPD					
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.498.314.500,00	2.200.056.800,00	298.257.700,00	88,06	100,00
<ul style="list-style-type: none"> Penyerapan Anggaran tidak maksimal karena tidak terbnyta SPD hingga akhir tahun anggaran di beberapa kegiatan Terdapat Realisasi pembayaran utang Tahun Anggran 2020 sebesar 1.649.553.000,- 					
b. Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.578.334.069,00	79.003.839.029,00	1.574.495.040,00	98,05	
Masukan	Anggaran yang terealisasi Rp. 79.006.839.029,00				
Keluaran	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan tepat waktu				
Hasil	Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan (98,05)				
Sumber Dana	Pendapatan Asli Daerah				
Lokasi	Provinsi dan UPTD Dinas				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	79.081.065.069,00	77.758.706.529,00	1.322.358.540,00	98,33	100,00
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat beban TPP bulan Desember yang belum terbanyarkan sehingga berpotensi menjadi Utang Tercapat Realisasi Pembayaran Utang Tahun Anggaran sebesar 3.160.576.927,- 					
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.164.500,00	29.885.000,00	25.279.500,00	54,17	100,00
Pelaksanaan kegiatan tidak relevan dilaksanakan karena efesiensi waktu sehingga penyerapan Anggaran tidak maksimal					
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.435.845.500,00	1.209.557.500,00	226.288.000,00	84,24	100,00
Pelaksanaan kegiatan tidak relevan dilaksanakan karena efesiensi waktu sehingga penyerapan Anggaran tidak maksimal					
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.259.000,00	5.690.000,00	569.000,00	90,91	100,00
Pelaksanaan kegiatan tidak relevan dilaksanakan karena efesiensi waktu sehingga penyerapan Anggaran tidak maksimal					
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.088.048.484,00	7.810.175.190,00	1.277.873.294,00	85,94	
Masukan	Anggaran yang terealisasi Rp.7.809.381.772,00				
Keluaran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Hasil	Terepenuhinya Sarana dan Perkantoran (85,93%)				
Sumber Dana	Pendapatan Asli Daerah				
Lokasi	Provinsi dan UPTD Dinas				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1.231.400.000,00	1.096.024.906,00	135.375.094,00	89,01	100,00
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat Beban Tagihan Untuk bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada Tahun selanjutnya yang berpotensi menjadi utang Terdapat Realisasi Pembayaran Utang Tahun Anggran 2020 sebesar 81.153.136,- 					
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.856.648.484,00	6.714.150.284,00	1.142.498.200,00	85,46	100,00

		<ul style="list-style-type: none"> - Penyerapan anggaran Tidak maksimal karena tidak terbitnya SPD hingga akhir Tahun anggaran di beberapa Kegiatan - Terdapat Realisasi Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2020 sebesar 2.243.249.900,- 				
d.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.682.735.000,00	2.084.225.133,00	2.596.509.867,00	44,55	
	Masukan	Anggaran yang terealisasi RP.2.084.002.951,00				
	Keluaran	Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SKPD				
	Hasil	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SKPD (44,50%)				
	Sumber Dana	Pendapatan Asli Daerah				
	Lokasi	Provinsi dan UPT Dinas				
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	940.960.000,00	576.701.633,00	364.258.367,00	61,29	100,00
	Pelaksanaan kegiatan tidak relevan dilaksanakan karena efeslensi waktu sehingga penyerapan Anggaran tidak maksimal					
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.741.775.000,00	1.509.523.500,00	2.232.251.500,00	40,34	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyerapan anggaran Tidak maksimal karena tidak terbitnya SPD hingga akhir Tahun anggaran di beberapa Kegiatan - Terdapat Realisasi Pembayaran Utang Tahun Anggran 2020 sebesar 11.775.000,- 					
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	263.804.961.346,00	224.798.032.634,90	39.006.928.711,10	85,21	100,00
a.	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	177.621.196.188,00	153.862.660.518,00	23.758.535.670,00	86,62	
	Masukan	Anggaran yang terealisasi Rp.153.862.656.11800				
	Keluaran	Pemenuhan Keputuahn Sarana Pertanian				
	Hasil	Tersedianya Kebutuhan Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian Lainnya (86,62)				
	Sumber Dana	Pendapatan Asli Daerah				
	Lokasi	Keleompok Tani Sasaran di Kabaupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	170.351.869.338,00	146.733.882.788,00	23.617.986.550,00	86,14	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat beberapa Kegiatan yang kelengkapan dokumen pembayaran tidak ditindaklanjuti sampai akhir tahun anggaran sehingga berpotensi menjadi Utang - Terdapat Realisasi Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2020 sebesar 22.874.892.438,- 					
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Peredaran sarana Pertanian	7.269.326.850,00	7.128.777.730,00	140.549.120,00	98,07	100,00
	Terdapat Realisasi pembayaran Utang Tahun Anggaran 2020 sebesar 1.156.241.850,-					
b.	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	86.183.765.158,00	70.935.372.116,90	15.248.393.041,10	82,31	
	Masukan	Anggaran yang Terealisasi Rp.70.935.72.116,90				
	Keluaran	Pemenuhan kebutuhan Bibit/bahan tanamanTanaman Panga, Hortikultura				

		dan Perkebunan			
Hasil	Tersedianya Bibit/Bahan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				
Sumber Dana	Pendapatan Asli Daerah				
Lokasi	Kelompok Sasaran pada Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Perederaan Benih/Bibit Hortikultura	7.710.012.100,00	5.593.904.332,90	2.116.107.767,10	72,55	100,00
<ul style="list-style-type: none"> - Penyerapan anggaran Tidak maksimal karena tidak terbitnya SPD hingga akhir Tahun anggaran di beberapa Kegiatan - Terdapat Realisasi Pembayaran Utang Tahun anggaran 2020 sebesar 521.000.000,- 					
Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Perederaan Benih/Bibit Tanaman Pangan	33.381.939.458,00	20.635.407.661,00	12.746.531.797,00	61,82	100,00
<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat beberapa Kegiatan yang kelengkapan dokumen pembayaran tidak ditindaklanjuti sampai akhir tahun anggaran sehingga berpotensi menjadi Utang - Terdapat Realisasi Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2020 sebesar 15.139.643.335,- 					
Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Perederaan Benih/Bibit Perkebunan	45.091.813.600,00	44.706.060.123,00	385.753.477,00	99,14	100,00
Terdapat Realisasi Pembayaran Utang Tahun 2020 sebesar 168.498.600,-					
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASANA PERTANIAN	195.137.273.359,00	156.503.137.255,28	38.634.136.103,72	80,20
a.	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	195.137.273.359,00	156.503.137.255,28	38.634.136.103,72	80,20
Masukan	Anggaran yang Terealisasi Rp. 156.503.137.255,28				
Keluaran	Pemenuhan Prasarana Pertanian				
Hasil	Tersedianya Fasilitas Prasarana Pertanian pada Kelompok Tani Sasaran dan UPTD				
Sumber Dana	Pendapatan Asli Daerah				
Lokasi	Kelompok Tani sasaran dan UPTD pada kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	12.086.932.874,00	5.086.923.874,00	7.000.000.000,00	42,09	100,00
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat Realisasi Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2020 sebesar 5.086.923.874,- ✓ Pelaksanaan kegiatan yang merujuk pada efisiensi waktu kegiatan tidak relevan lagi untuk dilaksanakan karena penganggaran kegiatan dilaksanakan pada DPA Perubahan sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal 					
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	113.227.860.340,00	94.282.415.304,00	18.945.445.036,00	83,27	100,00
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat beberapa Kegiatan yang kelengkapan dokumen pembayaran tidak ditindaklanjuti sampai akhir tahun anggaran sehingga berpotensi menjadi Utang ✓ Terdapat Realisasi Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2020 sebesar 26.854.027.550,- 					
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	60.545.244.145,00	50.155.340.614,71	10.389.903.530,29	82,84	100,00
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat beberapa Kegiatan yang kelengkapan dokumen pembayaran tidak ditindaklanjuti sampai akhir tahun anggaran sehingga berpotensi menjadi Utang ✓ Terdapat Realisasi Pembayaran Utang tahun Anggaran 2020 Sebesar 16.364.158.949,70 					

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4.302.672.000,00	3.035.616.750,00	1.267.055.250,00	70,55	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelaksanaan kegiatan tidak relevan dilaksanakan karena efisiensi waktu sehingga penyerapan Anggaran tidak maksimal ✓ Tidak Terbnyta SPD hingga akhir tahun anggaran di beberapa kegiatan ✓ Terdapat Realisasi Pembayaran Utang Tahun anggaran 2020 sebesar 198.000.000,- 					
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gudang UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	4.974.564.000,00	3.942.831.712,57	1.031.732.287,43	79,26	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak Terbnyta SPD hingga akhir tahun anggaran di beberapa kegiatan ✓ Terdapat Realisasi Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2020 sebesar 169.894.000,- 					
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.622.396.000,00	1.572.510.168,00	49.885.832,00	96,93	
a	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.622.396.000,00	1.572.510.168,00	49.885.832,00	96,93	
	Masukan	Anggaran yang Terealisasi Rp.1.572.510.168,00				
	Keluaran	Terepenuhinya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
	Hasil	Terlaksananya Penanggulanngn Bencana pada Lahan Pertanian dan Pemberantasan Hama Pertanian				
	Sumber Dana	Pendapatan Asli Daerah				
	Lokasi	Kabupaten/kota				
	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.622.396.000,00	1.572.510.168,00	49.855.832,00	96,93	100,00
	Terdapat Realisasi Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2020 sebesar 399.861.000,-					
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	7.134.506.820,00	4.277.686.802,00	2.856.820.018,00	59,96	
a	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	7.134.506.820,00	4.277.686.802,00	2.856.820.018,00	59,96	
	Masukan	Anggaran yang Terealisasi Rp.4.277.686.802,00				
	Keluaran	Terepenuhinya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				
	Hasil	Terlaksananya Pengembangan SDM dan Pengetahuan pada Penyuluh Pertanian dan Petani				
	Sumber Dana	Pendapatan Asli Daerah				
	Lokasi	Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	7.134.506.820,00	4.277.686.802,00	2.856.820.018,00	38,02	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak Terbnyta SPD hingga akhir tahun anggaran di beberapa kegiatan ✓ Terdapat Realisasi Pembayaran Utang Tahun anggran 2020 sebesar 682.887.000,- 					

Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara Responden 1

Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara Responden 2

Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara Responden 3